

FREE RIDER

Politik Identitas Para Bangsawan

ANDI TENRI SOMPA



CEPP - ULM

"Making Democracy Works for Indonesian People"



FREE RIDER

Politik Identitas Para Bangsawan

ANDI TENRI SOMPA



CEPP - ULM

"Making Democracy Works for Indonesian People"

FREE RIDER

Politik Identitas Para Bangsawan
ANDI TENRI SOMPA

@2020

All rights reserved

x + 112 hal; 15 x 23cm

ISBN:



Desain Layout :
Rasta Albanjari

Diterbitkan Oleh :



Center for Election And Political Party (CEPP)
Universitas Lambung Mangkurat (ULM)
Banjarmasin

KUTIPAN PASAL 27
Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta
(UU No.19 Tahun 2002)

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) di pidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1), diidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

SEKAPUR SIRIH



Diceritakan, penduduk suatu kota sepakat menggelar sebuah pesta untuk persaudaran dan kebersamaan mereka. Karena pesta itu sifatnya dari dan untuk mereka, sehingga dilakukan dengan cara gotong royong, dimana para tamu yang datang membawa makanan dan minuman sendiri.

Dalam undangan, tertulis aturan “BYO” atau *Bring Your Own*. Para tamu berdatangan. Masing-masing membawa makanan dan minuman untuk dinikmati bersama.

Ditengah pesta, datang seseorang yang hanya membawa segelas air putih biasa. Orang tersebut datang dengan maksud hanya numpang bersenang-senang, tanpa mengikuti aturan dan enggan untuk menyumbang.

Orang-orang model seperti tamu tersebut, diistilahkan dengan “free rider” atau penumpang gratis atau penumpang gelap. Dalam dunia politik, selalu saja ada orang-orang yang menunggangi keadaan demi kepentingannya.

Free rider, dalam ekonomi mengacu pada seseorang yang memperoleh keuntungan dari sumber, barang atau layanan, tanpa membayar biaya dari keuntung. Istilah Free rider pertama kali digunakan dalam teori ekonomi barang publik. Meskipun istilah Free rider berasal dari teori ekonomi, tetapi konsep yang sama juga dipakai dalam ilmu politik, psikologi sosial dan disiplin ilmu lainnya.

Istilah free rider tidak begitu populer dikalangan masyarakat umum di Indonesia. Meskipun sebenarnya, perilaku dan peristiwa dimana satu pihak memanfaatkan

ANDI TENRISOMPA —

kondisi tertentu untuk kepentingan kelompok atau dirinya sendiri, seringkali terjadi dalam dunia perpolitikan tanah air. Namun hal tersebut luput dari perhatian, karena masyarakat secara umum tidak memahaminya sebagai sebuah perilaku atau strategi politik.

Pemilihan kata *free rider* yang dipakai penulis sebagai judul buku, sangat memancing animo pembaca. Dalam hal ini, penulis jeli menggunakan “ketidak tahuan” pembaca secara umum, tentang *free rider*.

Buku ini juga berani. Bagaimana penulis dengan lugas, mengupas tentang fenomena politik di daerah, dalam hal ini Sulawesi Selatan (Sulsel). Mengupas tentang elit bangsawan Bugis, secara langsung bersentuhan dengan “kekuasaan” dan area atas tatanan struktur sosial masyarakat. Meski begitu, penulis mampu menjabarkan dengan gamblang tentang redefinisi kebangsawanan elite bangsawan Bugis yang kemudian menghasilkan pseudo bangsawan, yang bermetamorfosis menjadi *free raider*.

Sebagai peninggalan masa lampau, elite bangsawan mendapatkan tempat tersendiri dalam kultur sosial masyarakat Indonesia. Namun, dalam siklus kekuasaan, tidak semua daerah di Indonesia para elite bangsawan mampu mempertahankan peran dan pengaruh yang kuat.

Hal yang menarik kemudian, ketika penulis mengupas betapa fenomena elit bangsawan Bugis dilingkar kekuasaan daerah setempat, masih kuat. Kondisi tersebut, seakan mengacuhkan pengaruh reformasi terhadap tumbuhnya

— *ANDI TENRI SOMPA*

demokrasi dan kebebasan berpolitik. Lebih menarik lagi, ketika kondisi itu memunculkan fenomena para psudeo bangsawan dilingkup kekuasaan politik Sulsel.

Membaca buku ini, memunculkan rasa penasaran. Bagaimana peran psudeo bangsawan yang menjadi free rider dalam memanfaatkan momen politik di daerah. Bagaimana perilaku dan kepemimpinannya.

Apakah psudeo bangsawan dalam hal ini mampu mempertahankan nilai-nilai lama yang dikagumi masyarakat, seperti perilaku yang mulia, misalnya. Ataukah, keberadaan psudeo bangsawan yang menjadi free rider itu justru memudahkan nilai-nilai lama tersebut.

ANDI TENRI SOMPA —

PENGANTAR
PENULIS



Elite bangsawan atau elite tradisional, merupakan peninggalan masa lampau. Elite bangsawan tumbuh di jaman kejayaan kerajaan yang kemudian berlanjut pada jaman pemerintahan kolonial Belanda maupun Jepang, namun dengan kondisi yang terus mengalami kemerosotan.

Dimasa lalu, kaum bangsawan memegang tampuk kekuasaan mulai dari lingkup kerajaan hingga tingkatan pemerintahan terendah di kampung-kampung.

Fenomena tersebut, saat ini mulai mengalami pergeseran. Meski begitu, sebagian dari mereka (kaum elite bangsawan) hingga kini masih mendapatkan pengaruh, peranan serta prestise dari norma dan nilai-nilai adat, yang bagaimanapun juga harus diakui belum ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia.

Kondisi yang sama juga terjadi di Propinsi Sulawesi Selatan. Bangsawan yang berhasil melengkapi diri dengan pendidikan dan pengalaman, terbukti tetap mendapatkan kepercayaan untuk memegang kekuasaan di pemerintahan. Bahkan, seringkali mendapat prioritas tersendiri. Kondisi tersebut memberikan kontribusi lebih lanjut pada perkembangan perpolitikan di Sulawesi Selatan.

Pemilihan Gubernur di Sulawesi Selatan, merupakan salah satu bentuk kekuasaan politik elite bangsawan Bugis yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum. Sosok elite bangsawan Bugis yang berpengaruh memberikan kontribusi yang besar pada terjadinya berbagai perubahan dan pembangunan lapisan

ANDI TENRI SOMPA —

sosial serta memudarnya bentuk-bentuk kebangsawanan. Kondisi yang kemudian memberikan implikasi pada sistem pemerintahan yang mengalami pergeseran dari sistem pemerintahan yang otoritarian dan sentralistik, ke arah sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistik.

Sejalan dengan kondisi itu, otonomi daerah dan isu demokrasi yang secara umum ingin diterapkan di Indonesia, mengalami kontradiktif ketika kita menyorot pada fenomena pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2002. Disatu sisi, otonomi daerah telah berjalan sesuai aturan. Namun disisi lain, konsep demokrasi ala Barat yang telah teradopsi selama ini belumlah terealisasi. Justru yang nampak dalam fenomena tersebut adalah politik identitas. Dimana identitas kultural baik yang berdasarkan atas agama, bahasa, ras, kawasan, bangsa dan suku, memperoleh momentum untuk tampil dominan di arena politik publik.

Kondisi yang sangat menarik untuk dicermati, bahwa inilah model penghancuran terhadap konsep demokrasi ataukah justru suatu konsep demokrasi baru yang berasal dari ide budaya lokal?.

Buku ini membahas tentang bagaimana figur bangsawan Bugis yang menjadi elite penentu dalam perpolitikan di Sulawesi Selatan. Yang mana hal tersebut juga nampak pada momentum suksesi kepemimpinan Gubernur, sebagai parameter kepemimpinan.

Disini penulis mengupas bagaimana peran bangsawan Bugis dalam mengkonversi otoritas tradisional, bagaimana

— ANDI TENRI SOMPA

proses konversi otoritas tradisional elit bangsawan Bugis hingga kontruksi sosial elit bangsawan Bugis tentang politik.

Diharapkan, selain mengetahui apa dan bagaimana peran serta keterlibatan elit bangsawan dalam perpolitikan di Sulawesi Selatan, pembaca juga akan memahami bagaimana potret bangsawan Bugis mulai dari stratifikasinya dalam masyarakat hingga gambaran demokrasi dalam perspektif etnis Bugis dan eksistensi kekuasaan para bangsawan.

Akhir kata, penulis berharap buku ini akan menjadi alternatif bacaan, tetapi lebih dari itu, bisa menjadi bahan rujukan bagi yang ingin mengetahui gambaran perpolitikan di Sulawesi Selatan secara umum. Khususnya peran serta dan eksistensi para elit bangsawan Bugis dalam penentuan arah serta peta politik setempat.

Penulis,

Andi Tenri Somp

ANDI TENRI SOMPA —

DAFTAR ISI



— ANDI TENRI SOMPA

Hal

SEKAPUR SIRIH _____	x
PENGANTAR PENULIS _____	xi
DAFTAR ISI _____	xii
PROLOG _____	1
EKSISTENSI KEKUASAAN PARA BANGSAWAN _____	7
Elite Tradisional _____	9
Peran Elite Bangsawan _____	17
POTRET BANGSAWAN BUGIS _____	21
Stratifikasi Masyarakat Bugis _____	23
Budaya Siri' _____	39
Demokrasi Dalam Perspektif Etnis Bugis _____	42
BANGSAWAN DAN KONVERSI	
OTORITAS TRADISIONAL _____	45
Proses Konversi Otoritas Tradisional	
Elit Bangsawan Bugis _____	47
Konstruksi Sosial Elit Bangsawan Bugis	
Tentang Politik _____	81
EPILOG _____	87
DAFTAR PUSTAKA _____	99
TENTANG PENULIS _____	113

ANDI TENRI SOMPA —

PROLOG



Elite bangsawan atau elite tradisional merupakan peninggalan masa lampau, pada masa kejayaan kerajaan Nusantara. Kemudian pada masa penjajahan kolonial Belanda dan Jepang, keberadaannya mulai merosot.

Meski begitu, sebuah fenomena menarik muncul di Sulawesi Selatan, dimana kalangan elite bangsawan Bugis masih memiliki peran dan pengaruh dalam siklus kekuasaan setempat.

Hingga saat ini, sebagian besar para elite bangsawan Bugis di Sulawesi Selatan masih mendapatkan pengaruh, peranan dan prestise dari norma serta nilai-nilai adat yang belum ditinggalkan oleh masyarakat. Kondisi tersebut, selanjutnya memberi kontribusi pada perkembangan perpolitikan di Sulawesi Selatan.

Keabsahan kelompok elite bangsawan Bugis yang ditakdirkan sebagai kelompok pemerintah, memiliki legitimasi yang kuat. Era reformasi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan demokratisasi dan kebebasan berpolitik, ternyata tidak terjadi di Sulawesi Selatan.

Kaum elite bangsawan Bugis tampaknya masih merupakan kelompok yang mampu bertahan dengan stamina yang cukup kuat, bahkan masih sangat disegani dan dihormati, ditengah gerusan gelombang demokratisasi yang tiada henti-hentinya. Fenomena tersebut sangat menarik untuk dicermati. Dimana politik elit bangsawan Bugis ternyata tetap eksis ditengah arus demokratisasi di Indonesia.

ANDI TENRISOMPA —

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskripsikan posisi elite bangsawan Bugis dalam struktur sosial saat ini, serta proses konversi otoritas tradisional elite bangsawan dalam melakukan perubahan politik di wilayah publik, ditengah maraknya transisi demokrasi di Indonesia dan derasnya arus demokratisasi di dunia ketiga. Disamping itu, juga sebagai upaya mendiskripsikan tentang bagaimana elite bangsawan Bugis membangun konstruksi sosial atas realitas politiknya.

Elite bangsawan Bugis melakukan konversi otoritas tradisionalnya dalam melakukan perubahan politik di wilayah publik, sebagai antisipasi dalam menghadapi transisi demokrasi. Hal tersebut ditempuh dengan beberapa cara.

Pertama, redefinisi kebangsawanan elite bangsawan Bugis yang kemudian menghasilkan pseudo bangsawan yang menjadi *free raider* (pembonceng gratis) yang memanfaatkan momen tersebut.

Kedua, untuk mengeksiskan diri dibutuhkan pendidikan formal. *Ketiga*, melakukan perkawinan politik sebagai manifestasi melapangkan jalan menuju puncak kekuasaan. *Keempat*, mengupayakan melakukan mobilisasi identitas etnis melalui pembentukan organisasi-organisasi kedaerahan yang akan digunakan sebagai alat legitimasi dan *bargaining position*.

Kelima, mempertahankan pola patron-klien sebagai wujud pertahanan otoritas tradisional. Keenam, menciptakan hegemoni baru terhadap etnis lain melalui pendekatan-pendekatan emosional.

— ANDI TENRI SOMPA

Elite bangsawan Bugis dalam mempertahankan dan memperebutkan serta mendapatkan legitimasi terhadap kekuasaannya, melakukan konstruksi sosial dalam memahami dinamika masyarakat. Yaitu melalui konstruksi tentang politik yang meliputi kekuasaan, legitimasi, wilayah privat-publik, ideologi, kepentingan, negara, politik bangsawan dalam struktur sosial, hubungan elite-massa, partisipasi politik massa dan demokrasi.

Akhirnya, dalam masa transisi demokrasi di Indonesia, elite bangsawan Bugis di Sulawesi Selatan mampu mensiasati kondisi riil yang kurang berpihak pada kekuasaan tradisional. Bahkan kondisi tersebut menyulut penguatan kekuasaan mereka dan kelompoknya, terhadap masyarakat luas.

Sadar atau tidak, masyarakat Sulawesi Selatan telah terkooptasi oleh *style of life* dimana *Puang* (gelar kebangsawanan) menjadi simbol artikulasi paling penting bagi hubungan sosial di wilayah kekuasaan elite bangsawan Bugis. Dan simbol *ke-Bugis-an* menjadi prasyarat yang tidak tertulis untuk menjadi elite di Sulawesi Selatan.

ANDI TENRI SOMPA —

EKSISTENSI KEKUASAAN
PARA BANGSAWAN



Elite Tradisional

Dikalangan para ahli, konsep kekuasaan dianggap memiliki sifat yang sangat mendasar dalam ilmu sosial pada umumnya dan ilmu politik khususnya. Bahkan pada suatu ketika, politik diidentikkan dengan masalah kekuasaan. Karena bagaimana pun, kekuasaan tetap merupakan gejala sentral dalam ilmu politik, (Dahl, 1963; Almond, 1977; Gunnell, 1983; Budiardjo, 1984; Zainuddin, 1992).

Berbagai paradigma bermunculan seputar konsep kekuasaan. Pada intinya memberikan gambaran bagaimana suatu perilaku yang dapat mempengaruhi perilaku yang lain, yang pada akhirnya mengikuti perilaku yang memegang kekuasaan (Budiardjo, 1984; 9).

Elite bangsawan atau elite tradisional merupakan peninggalan masa lampau. Elit bangsawan tumbuh di jaman kejayaan kerajaan yang kemudian berlanjut pada jaman pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang, namun dengan kondisi yang terus mengalami kemerosotan (Pelras, 1981: 11).

Dimasa lalu, kaum bangsawan memegang tampuk kekuasaan mulai dari lingkup kerajaan hingga tingkatan pemerintahan terendah di kampung-kampung.

Fenomena tersebut, saat ini mulai mengalami pergeseran. Meski begitu, sebagian dari mereka (kaum elit bangsawan) hingga kini masih mendapatkan pengaruh,

ANDI TENRI SOMPA —

peranan serta prestise dari norma dan nilai-nilai adat, yang bagaimanapun juga harus diakui belum ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia.

Kondisi yang sama juga terjadi di Propinsi Sulawesi Selatan. Bangsawan yang berhasil melengkapi diri dengan pendidikan dan pengalaman, terbukti tetap mendapatkan kepercayaan untuk memegang kekuasaan di pemerintahan. Bahkan, seringkali mendapat prioritas tersendiri. Kondisi tersebut memberikan kontribusi lebih lanjut pada perkembangan perpolitikan di Sulawesi Selatan.

Pemilihan Gubernur di Sulawesi Selatan, merupakan salah satu bentuk kekuasaan politik elite bangsawan Bugis yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum (pemerintah). Bagaimana kemudian figur elit bangsawan Bugis menjadi penentu dalam perpolitikan di Sulawesi Selatan. Hal yang juga nampak pada momentum suksesi kepemimpinan gubernur sebagai parameter kepemimpinan di Sulawesi Selatan.

Sosok elite bangsawan Bugis yang berpengaruh, meski sudah puluhan tahun kemerdekaan Republik Indonesia, memberikan kontribusi yang besar pada terjadinya berbagai perubahan dan pembangunan lapisan sosial serta mudarnya bentuk-bentuk kebangsawanan. Kondisi yang kemudian memberikan implikasi pada sistem pemerintahan yang mengalami pergeseran dari sistem pemerintahan yang otoritarian dan sentralistik, ke arah sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistik.

— ANDI TENRI SOMPA

Sejalan dengan kondisi itu, otonomi daerah dan isu demokrasi yang secara umum ingin diterapkan di Indonesia, mengalami kontradiktif ketika kita menyorot pada fenomena pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2002.

Disatu sisi, otonomi daerah telah berjalan sesuai aturan. Namun disisi lain, konsep demokrasi ala Barat yang telah teradopsi selama ini belumlah terealisasi. Justru yang nampak dalam fenomena tersebut adalah politik identitas. Dimana identitas kultural baik yang berdasarkan atas agama, bahasa, ras, kawasan, bangsa dan suku, memperoleh momentum untuk tampil dominan di arena politik publik (Cable, dalam Gerbang, 1999; 43).

Kondisi yang sangat menarik untuk dicermati. Bahwa, inilah model penghancuran terhadap konsep demokrasi ataukah justru suatu konsep demokrasi baru yang berasal dari ide budaya lokal?.

Era reformasi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan demokratisasi dan kebebasan berpolitik, ternyata tidak terjadi di Sulawesi Selatan. Fenomena tersebut nampak pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu ilustrasi kekuasaan politik elite bangsawan Bugis.

Berbaga kompromi nampak dalam pemilihan tersebut yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Pemilihan. Adanya campur tangan elite bangsawan Bugis dalam bentuk penolakan dan penerimaan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur, melemahkan posisi Panitia Pemilihan sebagai

ANDI TENRISOMPA —

media independen dalam menyeleksi calon gubernur dan wakil gubernur.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 34 dijelaskan tentang pengisian jabatan Kepala Daerah dan wakilnya yang dilakukan melalui pemilihan oleh DPRD secara bersama melalui tahapan pencalonan, sekaligus DPRD menjadi panitia pemilihan.

Undang-Undang tersebut jelas memberikan legitimasi secara legal formal kepada DPRD Sulawesi Selatan untuk menyeleksi bakal calon. Sehingga peran DPRD sebagai Panitia Pemilihan menentukan siapa saja yang memenuhi syarat untuk ikut dalam bursa pencalonan. DPRD sebagai representasi dari suara rakyat, dalam hal ini sebagai Panitia Pemilihan senantiasa merujuk kepada aturan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, pengesahan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam bagian kedua syarat bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada ayat (5) disebutkan, bahwa Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur, wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran.

Undang-Undang tersebut nampaknya tidak berlaku pada pemilihan gubernur Sulawesi Selatan, yang secara legal formal calon gubernur terpilih tidak memenuhi syarat sesuai

— ANDI TENRI SOMPA

dengan Tatib (Tata tertib) Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur. Dimana seorang calon Gubernur/Wakil Gubernur harus melepaskan jabatan sebelum mencalonkan diri.

Kenyataannya, jabatan sebagai Bupati belum dilepas sampai benar-benar dinyatakan sebagai Calon Gubernur/Wakil Gubernur. Sampai pada pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, jabatan tersebut dilepas secara tidak formal dan setelah terpilih sebagai Wagub (Wakil Gubernur), jabatan bupati baru dilepas secara resmi.

Ilustrasi diatas ternyata tidak menjadi masalah bagi Panitia Pemilihan, meskipun jelas dalam Tata Tertib tidak memenuhi syarat. Bahkan, sampai ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), hal itu tidak dipermasalahkan. Padahal jelas telah melanggar aturan main (Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000).

Kondisi tersebut memunculkan asumsi bahwa fenomena itu tidak lepas dari adanya kompromi dan kontrak politik yang dimainkan para elite politik bangsawan Bugis dalam pemilihan tersebut. Padahal kondisi Sulawesi Selatan yang pluralis dari segi etnis, bahasa dan agama, bahkan kalangan intelektual sekalipun dapat menerima. Hal itu terbukti dengan tidak adanya protes atau wacana yang secara kritis menolak hasil tersebut.

Kondisi diatas menjadi sangat menarik bila diteliti sebagai suatu fenomena sosial ditengah kondisi masyarakat dan negara yang dalam transisi demokrasi, yang memperjuangkan demokratisasi dan kebebasan berpolitik.

ANDI TENRISOMPA —

Kekuasaan politik elite bangsawan Bugis sebagai elite tradisional sekaligus sebagai elite penentu dalam pengambilan keputusan, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.

Telah banyak penelitian yang membahas tentang elit, perilaku elit, sejarah elit, rekrutmen elit, hingga konflik elit. Hasil studi menunjukkan terjadinya pergeseran peran elite tradisional, diiringi dengan semakin kuatnya pemimpin formal, menjadi argumen pembanding dalam penelitian ini, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang elite politik bangsawan Bugis.

Aminuddin, Bostan & Hamdat (2000); Kakib (2002) yang meneliti tentang aktualisasi nilai-nilai tradisional dalam kepemimpinan komunitas lokal, memberikan gambaran tentang bagaimana pentingnya kepemimpinan dan kelembagaan tradisional dalam pembangunan. Penelitian ini tidak secara khusus menjelaskan bagaimana kekinian pemimpin lokal di Sulawesi Selatan, lebih menyorot kepada bagaimana nilai-nilai lama menjadi penting dalam diri seorang pemimpin.

Hal senada juga nampak pada penelitian oleh Manuntun (1992) tentang pengaruh budaya politik lokal terhadap proses pengambilan keputusan. Juga Aliamir, (1993); Husni, (1993) tentang Sistem Kepemimpinan Kerajaan Wajo dan Gowa; Khalik (1999), Perkawinan Adat Bugis Paria, yang memberikan gambaran bagaimana pola mempertahankan keturunan bangsawan Bugis di kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

Penelitian Ali (1993), tentang analisis pemilihan Bupati Kepala Daerah tingkat II Sidenreng Rappan di Sulawesi Selatan, memberi deskripsi bagaimana tokoh elite bangsawan Bugis dan budaya politik menjadi penting dalam struktur pemilihan Bupati yang berasal dari aspirasi rakyat, yang menginginkan masyarakatnya dipimpin oleh elite bangsawan Bugis.

Penelitian tentang hubungan antar etnis yang dilakukan oleh Usman Pelly (1989), di kota Medan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak adanya kelompok etnis yang dominan menyebabkan terjadinya konflik etnis. Kecenderungan ini menyebabkan kelompok etnis mempertahankan identitas etnisnya untuk memperebutkan posisi dominan dalam berbagai sektor kehidupan.

Hal senada juga diteliti oleh Askari (1999), tentang integrasi sosial antara etnis Bugis dan etnis Makassar dengan mendeskripsikan bagaimana etnis Bugis melakukan pola interaksi dengan etnis Makassar dan memenangkan persaingan tersebut dalam posisi-posisi strategis di wilayah etnis Makassar. Penelitian tersebut lebih menekankan pada pola integrasi etnis Bugis yang mampu diterima di kalangan etnis Makassar, sehingga tidak terjadi resistensi.

Disisi lain, penelitian terhadap elite lokal, Yakub (1998), tentang Respon Elite Bugis Terhadap Diskursus Politik Orde Baru telah ada, dalam kajian ini dapat dijadikan follow up yang merupakan implikasi dari respon elite Bugis terhadap diskursus politik Orde Baru. Pada masa Orde Baru terjadi hegemoni oleh penguasa saat itu. Jikapun ada resistensi, tidak memberikan kontribusi yang besar untuk mengubah kondisi

ANDI TENRI SOMPA —

masyarakat. Ada kesan resistensi terhadap kebijakan pusat hanya setengah hati. Resistensinya hanya meminta otonomi daerah dan itu diberikan oleh pemerintah, tetapi tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan, bahwa untuk membangun integrasi pusat dan daerah, solidaritas etnis perlu ditumbuhkan. Dalam arti nilai-nilai budaya lokal dapat dijadikan perekat. Hadirnya elite Bugis yang melakukan resistensi pada kebijakan pusat yang menganggap tidak legitimate terhadap elite lokal Sulawesi Selatan.

Kondisi itu menjadi berbeda ketika Soeharto harus turun dari tahtanya. Seiring dengan diberikannya otonomi daerah di Sulawesi Selatan dan arus transisi demokrasi mulai dikumandangkan di Indonesia. Otonomi daerah berimbas pada lahirnya raja-raja kecil dan baru di daerah yang sebelumnya telah terpelihara. Hadirnya otonomi daerah semakin mengukuhkan keberadaannya.

Karena itu, menarik kemudian menyoroti elite lokal dalam dimensi yang berbeda. Otonomi daerah dan transisi demokrasi, memberi peluang kokohnya otoritas tradisional elite bangsawan Bugis yang telah diperjuangkan selama Orde Baru sampai saat ini dan terus dipertahankan, diperebutkan serta diupayakan untuk mendapatkan legitimasi secara terhormat. Dalam arti dapat diterima secara legal formal sebagai otoritas rasional oleh masyarakat Sulawesi Selatan secara umum. Hal tersebut akan menimbulkan kesan bahwa tidak ada alasan bagi masyarakat atau elite etnis lain untuk menolak kepemimpinan atau kekuasaan elit bangsawan Bugis.

Elite Bangsawan

Posisi kaum elite bangsawan Bugis sebagai kelompok elite pada masyarakat di Sulawesi Selatan, masih memiliki peran yang sangat penting dan strategis hingga saat ini. Kebangsawanan menurut Weber, merupakan suatu produk dari model kekuasaan yang bersandarkan pada tipe tradisional. Dalam tipe ini memungkinkan dibangunnya sebuah keabsahan bahwa otoritas status bangsawan Bugis boleh diturunkan berdasarkan pada kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat.

Penelitian yang dilakukan Pelras (1976), dan Heddy (1988), menunjukkan bahwa konsep kekuasaan tradisional yang dipegang oleh kaum bangsawan, ternyata ditopang secara kuat oleh narasi-narasi yang menempatkan kaum bangsawan sebagai patron atau pelindung bagi masyarakat, dari berbagai macam tekanan, bencana dan ancaman.

Disamping itu, narasi itu pun ditunjang oleh pondasi kuat berupa aneka ragam elemen yang sangat kental dengan aroma kesakralan. Relasi antara kebangsawanan dan elemen-elemen sacral, membangun suatu bentuk bangunan kokoh yang tidak dapat digugat oleh siapapun. Dengan demikian, keabsahan kelompok bangsawan yang ditakdirkan sebagai kelompok pemerintah, memiliki legitimasi yang kuat.

Penjungkir balikan terhadap konstruksi bangunan hubungan kesakralan itu, diyakini setidaknya akan

ANDI TENRI SOMPA —

memunculkan berbagai gejolak yang dapat menyengsarakan rakyat banyak.

Ketika arus demokratisasi melanda dunia ketiga sampai ke Indonesia, ide-ide mengenai demokrasi menjadi suatu wacana penting dan setidaknya merupakan katalisator bagi perubahan perpolitikan di tanah air. Kondisi yang berubah ini membawa implikasi yang berat ketika model kekuasaan yang bersandarkan pada otoritas tradisional maupun kharisma mulai digugat, ditantang, diancam dan dijungkir balikkan atau kalau perlu diberangus. Termasuk juga aktor-aktor politik yang mengarsiteki dan memainkan peran penting dalam ranah kekuasaan tradisional tersebut.

Kondisi ini pun juga ikut mempengaruhi atmosfer perpolitikan di Propinsi Sulawesi Selatan. Kedudukan kaum elite bangsawan Bugis yang ditakdirkan dan diabsahkan ke dalam posisi yang selalu memerintah, berdasarkan pada legitimasi statusnya yang istimewa. Setidaknya akan menjadi obyek yang terancam tereliminasi dengan segera, ketika arus deras gelombang demokratisasi mendarat ditanah Bugis.

Namun realita menunjukkan hal yang berbeda. Kaum bangsawan tampaknya masih merupakan kelompok yang mampu bertahan dengan stamina yang cukup kuat, bahkan masih sangat disegani dan dihormati di tengah gerusan gelombang demokratisasi yang tiada henti-hentinya. Peran pentingnya pun semakin kokoh dengan terbentuknya Dewan Adat Bugis saat ini.

Sebenarnya, ada makna apa dibalik kokohnya kelompok bangsawan ditengah wacana perpolitikan masyarakat Bugis.

— ANDI TENRI SOMPA

Mungkinkah kaum bangsawan Bugis telah mampu mensiasati proses perubahan dengan melakukan manuver cerdas, demi tercapainya proses adaptasi politik terhadap arus demokratisasi?.

Bila benar, siasat itu dalam bentuk apa. Apakah berupa langkah konversi terhadap otoritas tradisionalnya sehingga terwujud proses metamorfosa ke dalam bentuk yang lebih adaptif.

Tentu saja langkah menuju konversi tidak akan mudah. Karena bagaimanapun juga, langkah konversi setidaknya akan diawali dengan proses dekonstruksi dan rekonstruksi kembali. Proses dekonstruksi terhadap makna politik yang mereka pahami saat ini dan tentu saja juga menyangkut dengan kajian kritis terhadap posisi mereka di dalam struktur sosial masyarakat Bugis.

Berbicara mengenai proses dekonstruksi-dekonstruksi makna politik, kita tidak bisa mengabaikan juga mengenai apa arti kekuasaan bagi kaum bangsawan.

Lalu, bagaimana mereka membangun konstruksi kekuasaan barunya. Apakah perlu membangun model legitimasi baru agar kekuasaan yang dibentuknya memiliki pondasi yang kuat. Atau, mengubah tafsir ideologinya agar rakyat menjadi percaya. Ataukah juga, perlu membangun tafsir mengenai tentang konsep negara beserta makna demokratisasi yang lebih membumi.

Tentu saja orientasi perubahan tetap menekankan pada suatu kepentingan. Lalu kepentingan siapa?

ANDI TENRISOMPA—

Penekanan terhadap kepentingan siapa yang diutamakan, juga akan mempengaruhi tafsir atas hubungan antara elite bangsawan dengan massanya, serta tafsir atas ranah privat dan ranah publik. Demikian juga bentuk partisipasi politiknya, tentunya akan ikut menyesuaikan.

POTRET
BANGSAWAN BUGIS



Stratifikasi Masyarakat Bugis

Seperti umumnya masyarakat lain di Indonesia bahkan di seluruh dunia, masyarakat Bugis zaman dahulu terdiri atas tiga golongan, yaitu golongan orang-orang merdeka, para budak belian dan kaum bangsawan.

Golongan orang merdeka adalah mereka yang tidak memiliki hutang. Mereka pada golongan ini lahir dari orang tua yang merdeka dan sepanjang tujuh turunan, tidak mempunyai nenek moyang berdarah bangsawan.

Budak belian adalah semua orang yang tidak mempunyai kebebasan untuk bertindak sendiri sebagai akibat adanya suatu hukuman atau karena mereka tidak dapat membayar hutang, atau mereka yang lahir dari orang tua yang juga budak belian.

Memberikan defenisi kaum bangsawan lebih sulit, Pada hakekatnya, bangsawan adalah mereka yang masih mempunyai “darah putih” murni yang berasal dari leluhur, yang setengah dewa. Tetapi dalam masyarakat Bugis garis keturunannya adalah bilineal dan kaum bangsawan bukanlah posisi yang memaksakan endogami (Rhijn, dalam Pelras, 1981; Abidin, 1985; Mattulada, 1985; Rahim, 1988).

Pada masyarakat Bugis, anak yang lahir dari ayah yang berdarah murni dan ibu yang berasal dari orang kebanyakan, tidak serta merta mengikuti dan mewarisi kebangsawanan sang ayah ataupun sifat kerakyatan ibunya. Pemecahan kondisi

ANDI TENRI SOMPA —

yang seperti ini dapat kembali pada model pengakuan satu garis keturunan saja, sebagaimana yang berlaku di Eropa jaman kuno (Bloch, dalam Kortodirdjo (eds), 1981).

Kemungkinan penyelesaian yang lain, mungkin dengan memaksakan kedua orang tua harus berdarah bangsawan agar garis kebangsawanan dan keturunannya menjadi jelas, karena kondisi ini jelas membentuk suatu tingkatan bangsawan. Akan tetapi, kondisi itu tidak menjadi mudah bagi kalangan etnis Bugis, baik di kalangan bangsawan itu sendiri maupun di tengah masyarakat umum. Hal tersebut berkaitan dengan tata cara penyapaan dan pemberian perilaku serta sikap bagi mereka.

Adanya fenomena tersebut, enis Bugis memiliki jalan keluar, yaitu dengan membentuk tingkatan-tingkatan kebangsawanan pertengahan. Apabila dia seorang anak perempuan dan kemudian kawin dengan seorang laki-laki berdarah murni, maka anak-anak mereka akan menduduki tingkatan pertengahan di atas golongan ibunya. Jika dia seorang anak perempuan berdarah murni dan kawin dengan seorang laki-laki orang kebanyakan, maka anak-anak mereka akan masuk golongan pertengahan yang lebih rendah.

Apabila model seperti ini digunakan, maka akan hilang perbedaan yang tegas antara kaum bangsawan dengan orang kebanyakan. Sehingga kemudian, yang tersisa hanyalah bermacam-macam proporsi unsur bangsawan dan orang kebanyakan serta orang kebanyakan yang menunjukkan kedudukan seseorang. Semua kedudukan perorangan ini akan merupakan suatu stratifikasi yang tak pernah putus.

Stratifikasi sosial yang terbentuk pada masyarakat Bugis, sebagaimana telah diteliti oleh Friedericy dalam sebuah disertasi (1933), Abidin (1979), Mattulada (1985), yang berusaha menggambarkan stratifikasi masyarakat Sulawesi Selatan khususnya etnis Bugis.

Stratifikasi sosial masyarakat Bugis pada jaman dahulu yang dianggap terhisab dalam periode *Lontara'*, dan menurut banyak kalangan seperti tersebut diatas, bahwa struktur sosial masyarakat itulah yang mewarnai struktur politik kerajaan-kerajaan Bugis pada periode *Lontara'*, yaitu abad XIV sampai dengan abad XIX.

Silsilah Enis Bugis (Bone) Jaman Dahulu

A. *Ana' Arung To-Bone* (= Bangsawan orang Bone)

I. *Ana' Arung Matase'* (= Anak bangsawan penuh)

a. *Ana' Arung Mottola* (= Putera/puteri Mahkota)

b. *Ana' Arung Matase'* (= Putera-puteri raja-raja)

(A.I. ↑ _____ | A.I)

II. *Ana' Arung* (= Bangsawan)

1. *Ana' Arung ri bolang* (= Bangsawan warga istana)

(A.I. ↑ _____ | A.II.1)

(A.I. ↑ _____ | A.II.2)

ANDI TENRISOMPA__

2. *Ana' Arung si-pue* (= Bangsawan separuh)

(A.I. ↑ _____ B)

(A.II.1 ↑ _____ B)

(A.II.2 ↑ _____ B)

3. *Ana' Cera'* (= Bangsawan berdarah campuran)

(A.I. ↑ _____ C)

(A.II.1 ↑ _____ C)

(A.II.2 ↑ _____ C)

(A.II.3 ↑ _____ C)

B. *To-Maradeka* (= Orang merdeka)

I. *To-Deceng* (= Kepala-kepala Kaum/Anang)

II. *To-Sama'* (= Rakyat kebanyakan)

C. *Ata* (= Sahaya)

I. *Ata-Mana'* (= Sahaya warisan)

II. *Ata-Mabuang* (= Sahaya baru)

Keterangan tentang stratifikasi dalam masyarakat enis Bugis (Bone), sebagaimana diuraikan diatas (Mattulada, 1985):

1. Seorang laki-laki dari lapisan tertentu, boleh mengawini seorang perempuan dari lapisan yang sama, atau lapisan lebih rendah dari lapisannya, tetapi dia terlarang untuk kawin dengan perempuan lapisan atasnya.
2. Hanya anggota dari lapisan A.I.a.b. (*Ana' Arung matase'*) baik laki-laki maupun perempuan, yang boleh dicalonkan menjadi *Mangkau'* (Raja) di Bone. Mereka itu masih dianggap berdarah *To-Manurung*. Etnis Bugis menamakannya *To-Maddara Takku'*.
3. Putera-puteri dari luar Tanah-Bone yang dapat dijadikan permaisuri, sederajat dengan A.I. (*Ana' Arung Matase'*), hanyalah putera-puteri Mahkota dari Luwu', Gowa, Soppeng, Wajo dan Sidenreng.
4. *Ana' Arung Matase'* (A.I.b) lainnya dipersiapkan menjadi raja-raja bawahan, yang merangkap *Ade' Pitu* (Dewan kerajaan yang terdiri dari tujuh orang raja bawahan, yang menjadi daerah inti kerajaan Bone). Dari lapisan ini pula dipersiapkan tokoh-tokoh yang akan menduduki jabatan-jabatan penting dalam birokrasi kerajaan, seperti *PakkadattanaE*, *To-Marilaleng*, *Ponggawa*, dan *Arung Palili'* atas daerah-daerah perluasan diluar tujuh daerah inti, yang takluk atau menerima kekuasaan atau perlindungan dari Kerajaan Bone.

ANDI TENRISOMPA ___

5. Sebelum menjadi kerajaan yang diperintah oleh *To-Manurung*, Bone merupakan daerah-daerah *Anang* (=Kaum) yang terpecah-pecah. Masing-masing mempunyai daerah sendiri-sendiri, dipimpin oleh ketua Kaum masing-masing.

Pada perkembangan kerajaan Bone selanjutnya, para ketua Kaum yang disebut dalam bagan lapisan B, lambat laun digantikan oleh orang-orang dari lapisan A.I/II. Persekutuan-persekutuan *anang* dijadikan wanua yang diperintah oleh raja-raja bawahan yang berasal dari lapisan A.I. Ada tujuh wanua inti Kerajaan Bone. Tiap rajanya duduk dalam Dewan Kerajaan Bone, yaitu disebut *Ade' Pitu ana-Bone*.

Demikianlah, dengan melalui proses yang panjang seluruh jaringan kekuasaan dalam kerajaan Bone mulai pada tingkat atas (pusat) sampai ke daerah-daerah dan desa-desa yang tersebar luas dalam daerah Kerajaan, dikuasai oleh anasir lapisan A yang setia kepada tokoh sentral yang disebut *Mangku'* (Yang Berdaulat) di Tanah Bone.

Silsilah Etnis Bugis (Wajo) Zaman Dahulu

- A. *Ana' Mattola* (= Anak pewaris yang dipersiapkan untuk dapat menjadi *Arung* (Raja) di negerinya, juga dapat menjadi calon *Arung Matoa Wajo*)

I. *Ana' Matolla* (= Anak Pewaris)

a. (A.I.a \uparrow _____ | A.I.a)

b. (A.I \uparrow _____ | A.II)

II. *Ana' Sangaji* (= Anak terbilang mulia)

(A.I \uparrow _____ | A.III)

III. *Ana' Rajeng* (= Anak dihargai)

a. *Ana' Rajeng lebbi* (= Anak dihargai sangat)

(A.I. \uparrow _____ | A.IV.a)

b. *Ana' Rajeng biasa* (= Anak dihargai)

(A.II. \uparrow _____ | A.IV.a)

IV. *Ana' Cera'* (= Anak darah campuran)

a. *Ana' Cera Sawi* (= Anak berdarah campuran warga)

(A.I. \uparrow _____ | D.)

b. *Ana' Cera' Pua'* (= Anak bercampuran sahaya)

c. *Ana' Cera' Ampulajeng* (= Anak berdarah campuran sahaya baru)

(A.I \uparrow _____ | E.II)

ANDI TENRISOMPA__

d. Ana' Cera' latang Dapureng (= Anak berdarah campuran sahaya pribadi)

(A.I ↑ _____ | E.?)

B. Ana' Arung (= Anak bangsawan)

A. I, II, III, IV

C. Tau Deceng (= Orang baik-baik)

I. Tau Deceng

(C. ↑ _____ | D.)

II. Tau-deceng karaja

(C.I ↑ _____ | D.)

D. Tau Maradeka (= Warga Merdeka)

I. Tau Maradeka Mannenungeng (= Warga merdeka abadi)

II. Tau Maradeka Sampengi (= Warga merdeka yang berasal dari sahaya yang dibebaskan)

E. Ata (= Sahaya)

I. Ata-Mana' (= Sahaya warisan)

II. Ata-Mabuang (= Sahaya baru)

Keterangan tentang stratifikasi dalam masyarakat etnis Bugis (Wajo), sebagaimana diuraikan di atas (Abidin, 1985; Mattulada, 1985).

1. Karena Wajo tidak mengenal *To-Manurung*, maka stratifikasi masyarakatnya tersusun dari keadaan tiga buah negeri asal yang bergabung membentuk satu kesatuan bersama, yang disebut Tana Wajo'. Tana Wajo' dipimpin oleh seorang *Arung Matoa* yang dipilih bersama.
2. Pada tiap negeri yang mendukung kesatuan Wajo', sedari awal sudah terbentuk lapisan-lapisan masyarakat, seperti *Ana' Matola* yang digambarkan sebagai lapisan A, sesuai dengan perannya dalam kekuasaan negeri. Mereka adalah pemimpin kaum dari keluarga tertua.
3. Untuk jabatan *Arung Matoa Wajo'* sendiri, tidak ditentukan lebih dahulu tentang adanya Putera atau Puteri Mahkota, yang secara langsung atau dengan sendirinya diambil dari keturunan *Arung Matoa*.
4. Distribusi kekuasaan jabatan kerajaan di pusat dan di daerah-daerah bawahan, ditentukan dari bawah, menurut jenjang kekuasaan. Jabatan-jabatan tinggi kerajaan ditempati melalui saluran bawah, untuk sampai ke pusat kekuasaan. Tentu saja yang mendapat peluang-peluang tersebut adalah dari lapisan A, akan tetapi selalu saja terdapat kemungkinan untuk persaingan dari lapisan-lapisan B, C dan D, sesuai dengan kemampuannya. Hal demikian dapat dengan mudah

ANDI TENRISOMPA —

terjadi karena mobilitas sosial yang bersifat vertikal dimungkinkan secara meluas, baik melalui jasa dan pengabdian kepada negeri.

5. Hanya pada lapisan masyarakat Wajo' terdapat lapisan atas, yakni lapisan A, pada skema ini yang tidak disebut lapisan *ana' arung*. Lapisan A adalah lapisan sosial yang selalu dipersiapkan untuk menempati pucuk pimpinan kekuasaan politik atau elite politik. Lapisan *ana' arung* (B) adalah semata-mata keturunan-keturunan dari lapisan A yang melakukan perkawinan dengan perempuan dari lapisan *Tau maradeka* (D).

Etnis Bugis, jika dilihat dari stratifikasi yang diuraikan sebelumnya, maka dapatlah diperoleh gambaran umum tentang stratifikasi masyarakat Bugis ke dalam tiga lapisan (Friedericicy, 1933; Mattulada, 1985; Abidin, 1985), sebagai berikut :

1. *Ana' Arung*, yaitu lapisan raja beserta sanak-keluarganya; (kaum bangsawan)
2. *Maradeka*, yaitu lapisan rakyat jelata atau orang kebanyakan
3. *Ata*, yaitu sahaya.

Sementara itu, Van Rhijn membedakan lima kelas besar yang masing-masing dibagi lagi secara berbeda-beda dalam golongan-golongan yang lebih kecil (Rhijn dalam Pelras, 1981), yaitu sebagai berikut :

1. Kelas bangsawan tertinggi, dari golongan inilah diambil calon-calon yang akan dipilih untuk menjalankan kekuasaan kerajaan.
2. Kelas bangsawan pertengahan, yaitu yang disebut *ana' arung*.
3. Kelas orang baik-baik keturunan kaum bangsawan.
4. Kelas orang-orang yang merdeka atau bebas.
5. Kelas budak belian (*ata*).

Terjadinya lapisan *ata*, pada hakekatnya karena kekalahan perang, karena perampasan dan karena keputusan pengadilan. Dalam lontara juga dinyatakan bahwa seseorang menjadi *ata*, apabila :

1. Seorang yang kalah perang dijual oleh orang yang menang (perang) kepada orang lain, sebagai hasil kemenangan peperangan.
2. Seseorang yang menjual dirinya kepada orang lain.
3. Seseorang yang ditawan.
4. Yang melanggar *panngaderreng*.

Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan timbal balik dan tempat masing-masing dalam stratifikasi masyarakat jarang sekali ditentukan dengan cara yang telah diuraikan diatas, yang urutannya hanya diketahui oleh beberapa ahli saja. Tetapi ditentukan oleh tanda yang lebih jelas, yaitu dengan gelar-gelar kehormatan yang ditambahkan pada nama-nama pribadi, panggilan-panggilan yang dipakai di luar panggilan-

ANDI TENRISOMPA —

panggilan kekeluargaan dan hak-hak istimewa yang diperoleh karena kelahiran. Gelar-gelar dan sebutan-sebutan kehormatan yang dipakai di Sulawesi Selatan, yang sebenarnya merupakan keistimewaan yang nyata dalam susunan masyarakat etnis Bugis (Chabot dalam Pelras, 1981).

Nama-nama pribadi seperti *daeng*, secara teoritis tidak terbatas jumlahnya, karena semua nama benda atau kata sifat dapat dipergunakan untuk tujuan itu. Masing-masing nama membedakan jenis kelamin, misalnya *La* untuk laki-laki, *I* untuk wanita. Sebagai contoh: *La Wettuing* atau *I Wettuing*; *La Tenribali* atau *I Tenribali*. Dalam naskah kuno juga terdapat *We* untuk wanita.

Sebutan-sebutan selanjutnya sering menggunakan nama kedua, yang ditemukan pada naskah-naskah kuno dan yang bertahan sampai sekarang, adalah *Daeng*. Sebutan itu berlaku untuk dua jenis kelamin, misalnya saudara kembar *Sawerigading*, yaitu *We Tenriabeng* dan juga dinamai *Daeng Manutte*.

Tanda kehormatan semacam itu hanya diberikan kepada orang-orang yang tingkatan sebanding atau lebih tinggi dari *ampo cinaga*, yaitu keturunan bangsawan lapis ketiga, jadi dapat disamakan dengan gelar kebangsawanan. Yang mengutamakan menggunakan gelar seperti itu hanyalah orang-orang dari stratifikasi yang lebih rendah dari bangsawan lapis kedua. Dengan demikian dalam percakapan sehari-hari jika orang mengatakan atau menyapa dengan sebutan *Daeng*, maka kaum bangsawan Bugis rendahlah yang dimaksudkan.

Untuk para bangsawan Bugis yang lebih tinggi, dipakai sebutan atau gelar *Andi'*. Berbeda dengan *La* atau *I*, sebutan *Andi'* hanya dipakai bersama-sama dengan nama utama, pada tempat *La* atau *I*. Perbedaan tambahan untuk menunjukkan tingkatan dinyatakan juga dengan pemakaian nama kecil.

Seorang bayi dari etnis Bugis yang baru lahir tidak diberi nama sebelum diadakan upacara menaruh bayi dalam buaian atau ayunan. Upacara itu disebut *menre' tojong*. Biasanya orang cukup memanggilnya *Baso* untuk laki-laki, dan *Besse'* untuk perempuan dan untuk bangsawan yang tertinggi disebut *Bau'*.

Disamping cara panggilan, tingkatan-tingkatan masyarakat dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya suatu jumlah keistimewaan yang khusus untuk golongan-golongan tertentu. Keistimewaan tersebut berupa hak untuk mempergunakan beberapa macam benda, perhiasan atau menjalankan upacara-upacara tertentu di dalam rumah tangga. Bahkan dulu, di beberapa wanua ada pejabat-pejabat tertentu yang pekerjaannya mengawasi orang-orang agar tidak melanggar hak-hak tersebut.

Dalam hal berpakaian adat, juga nampak dalam kehidupan sehari-hari etnis Bugis. Misalnya songkok bagi kaum pria, yang dijalin dengan serat-serat halus anemmi (semacam tanaman yang dipetik dari hutan). Cara memakai songkok menunjukkan dengan jelas kedudukan orang dalam masyarakat.

Pada golongan *Tau Deceng* dan bangsawan rendahan dengan perhiasan pita halus keemasan. Untuk para *ana'*

ANDI TENRI SOMPA —

arung, songkok dihiasi dengan benang emas pada seperempat bagian tingginya. Mulai golongan *ana' sipue*, benang-benang tersebut naik sampai setengah tingginya dan pada golongan *ana' sengseng* menutup seluruh bagian pinggir songkok. Golongan yang berhak memiringkan songkoknya ke sebelah kanan adalah para *Andi'* dan yang lainnya harus menyusunnya benar-benar tegak.

Dalam hal kain-kain untuk pakaian, tidak ada corak khusus yang disediakan untuk suatu golongan atau yang lain, seperti halnya di Jawa atau Buton. Meski begitu, warna memerang peranan penting sebagai penanda dan tingkatan suatu golongan.

Seperti misalnya, warna hijau hanya boleh dikenakan oleh golongan *rajeng*, putih adalah warna khusus bagi pengasuh raja-raja dan kuning untuk para *sanre'* (dukun).

Pemakaian cincin juga khusus diperbolehkan bagi golongan bangsawan. Pemakaian cincin juga memiliki aturan tersendiri, dimana hanya para datu yang berhak memakainya pada ibu jari (*datuna jarie*).

Keris diperbolehkan pada semua orang, tetapi dihiasi secara berbeda-beda sesuai dengan martabat pemiliknya. Sarung yang seluruhnya keemasan untuk para bangsawan tinggi dan keemasan setengahnya untuk para *ana' cera'*.

Dalam hal makanan, hak mutlak kaum bangsawan untuk menikmati daging rusa dan belut. Daging rusa disebutkan sebagai hak istimewa untuk orang yang berburu, sementara belut berdasar pada alasan-alasan mitos.

Hal yang sama juga terjadi pada bentuk bangunan rumah. Rumah orang Bugis yang dibangun diatas tiang-tiang yang tingginya tidak kurang dari dua meter dan selalu menunjukkan bagan persegi panjang. Dalam bentuk yang paling sederhana, rangkanya terdiri atas tiga buah tiang besar. Masing-masing sebuah untuk tiap sudut, sebuah pada tengah-tengah setiap sisi dan sebuah tiang yang terdapat ditengah-tengah rumah.

Rumah bangsawan, yang khusus untuk para rajeng dan golongan yang lebih tinggi, mempunyai deretan tiang, lima ruangan dan sebuah tampung untuk para *Arung*. Rumah-rumah kaum bangsawan tingkat atas, dapat juga memiliki *tala-tala*, teras yang ditinggikan lima puluh sentimeter dan yang dapat dikatakan membentuk sebuah ruangan tambahan pada ujung yang berlawanan dengan jalan masuk.

Tangga sebuah rumah juga menggambarkan golongan atau strata pemiliknya. Hanya golongan bangsawan tertinggillah yang berhak atas *sapana*, yaitu tangga datar dari bambu. Sebagai anak tangga diatasnya ditaruh bilah-bilah bambu yang dijepit oleh dua buah jalur luar dan dua buah jalur tengah yang juga dibuat dari bambu.

Tangga tersebut sangat sulit digunakan karena posisinya yang melandai, hanya memungkinkan orang menaruh ujung kakinya pada anak-anak tangga yang juga sama miringnya. Untuk orang biasa atau orang kebanyakan, berhak memakai tangga yang sederhana dan sebahagian besar mempergunakan tangga dari potongan-potongan kayu bakar.

ANDI TENRI SOMPA —

Kondisi lain, stratifikasi dalam masyarakat Bugis juga nampak pada acara perkawinan. Jumlah *sompa* (maskawin) yang harus dibayar oleh pelamar, menunjukkan tingkat kebangsawanan seseorang.

Jumlah maskawin ditentukan oleh tradisi dan menjadi hak sang istri serta uang belanja perkawinan yang diberikan kepada orang tua dengan jumlah yang tidak terbatas. Hal tersebut menunjukkan rasa hormat pada tradisi dan sejalan dengan perlombaan untuk prestise pribadi.

Budaya Siri'

Adat entis Bugis atau dikenal dengan *pangadereng*, memiliki kontribusi sebagai kaidah penuntun perilaku dalam kehidupan sehari-hari. *Pangadereng* awalnya hanya memiliki empat unsur material, yaitu *Ade*, *Rapang*, *Bicara* dan *Wari*. Setelah agama Islam masuk, maka ditambahkan sebuah unsur lain yaitu *syara* – (syariat Islam) sehingga *Pangadereng* berisi lima unsur material.

Etnis Bugis meyakini, bahwa jika kelima unsur material ini dilaksanakan secara baik dan benar, maka akan mendatangkan kemakmuran serta kejayaan masyarakat, dalam sebuah sistem pemerintahan yang sedang berlangsung.

Jika ditilik secara cermat, unsur material dari *Pangadereng* yang disebut *ade* adalah suatu yang menyangkut norma dan semua aturan dalam kehidupan etnis Bugis. Unsur *rapang* adalah undang-undang yang mempertahankan tradisi serta etika bermasyarakat.

Unsur *bicara* adalah hal-hal yang bertalian dengan peradilan. Unsur material *wari* menyangkut aturan kehidupan dalam masyarakat. Sedangkan unsur *syara* sebagai tambahan setelah masuknya agama Islam, menyangkut tentang aqidah.

Etnis Bugis mengenal banua dan wanua yang diketuai oleh seorang *matoa*, namun tidak terikat pada tempat tinggal mereka. Kenyataan inilah yang membedakan etnis Bugis dengan etnis lainnya di Indonesia. Dengan demikian, setiap saat bagi etnis Bugis dapat pergi ke mana saja mereka mau.

ANDI TENRISOMPA —

Beberapa benua atau *wanua* berada dibawah kekuasaan mereka yang bergelar *karaeng*. Hubungan antara penguasa dan yang mendiami tempat tersebut, lebih bersifat suka rela serta dapat saja putus setiap saat. Hubungan itu yang disebut hubungan Patron-Klien atau *minawang* atau *ajjoareng* dan *joa*. Hubungan tersebut berdasarkan pada kesetiaan.

Menurut Mattulada (1985), ternyata kesetiaan itu bukanlah tanpa syarat. Klien tetap setia jika patronnya benar-benar menjaga *siri'*, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. *Siri'* merupakan sesuatu yang abstrak yang tidak dapat diamati namun hanya terlihat akibatnya saja.

Bagi etnis Bugis, hal tersebut melekat pada martabatnya sebagai manusia. Mereka menghayati sebagai panggilan untuk mempertahankan sesuatu yang dihormati dan dimiliki yang memiliki arti penting bagi diri pribadi serta persekutuan mereka. Begitu terjalin hubungan patron-klien maka tercipta suasana saling membela dan melindungi. Penghinaan terhadap patron akan dianggap sebagai penghinaan terhadap klien, begitu pula sebaliknya.

Pada dasarnya, dari konteks diatas terlihat bagaimana bentuk perwujudan konsep siri yang melekat kuat dalam alam pikiran etnis Bugis. *Siri'* sebagai esensi *pangadereng* ternyata bermakna harga diri dan rasa malu. Dan keduanya muncul dalam suasana yang berbeda, situasi sosial yang berbeda, maupun karena sebab-sebab yang berbeda.

Harga diri menyangkut keharusan individu mengenali dirinya, yakni mengenal tempatnya dalam masyarakat dengan

memperhatikan silsilah dan kedudukannya terhadap orang-orang di sekelilingnya. *Siri'* sebagai esensi *pangadereng* yang merupakan harga diri atas rasa malu, ternyata tidak hanya terdapat pada diri pribadi yang berpengaruh terhadap segala tingkah lakunya. Tetapi juga merupakan ikatan hubungan antara pribadi, sehingga dapat dikatakan sebagai adanya kesatuan *siri'* diantara mereka yang berhubungan. Lebih lanjut akan menimbulkan serta menghadirkan solidaritas kelompok kekerabatan.

La Side' Daeng Tapala (1977) antara lain menyatakan, bahwa *siri'* adalah sinonim dengan manusia susila. Dengan ungkapan *ianatu siri' e riaseng tau*, ia menarik kesimpulan :

- a. *Siri'* pada etnis Bugis adalah suatu lembaga susila yang mengkultuskan harga diri pada manusia.
- b. Pengertian *Siri'* pada etnis Bugis telah meningkat menjadi kemanusiaan.
- c. *Siri'* telah berhasil menanamkan dalam jiwa suku Bugis, bahwa tujuan hidup adalah menjadi manusia susila dengan memiliki harga diri yang tinggi.
- d. *Siri'* telah berhasil membangkitkan kekuatan-kekuatan yang menakjubkan pada etnis Bugis, yang nampak pada sejarah kehidupan suku tersebut.
- e. Perubahan nilai susila yang disebabkan pengaruh budaya asing tidak atau belum disadari oleh sebahagian besar etnis Bugis, yang menimbulkan jurang antara kesadaran atau pengertian susila mereka dengan hukum yang berlaku.

Demokrasi Dalam Perpektif Etnis Bugis

Konsep demokrasi yang teradopsi dari dunia barat, diterjemahkan sebagai pemerintahan dari rakyat menjadi sistem kekuasaan pemerintah yang berasal dari kehendak orang banyak atau rakyat. Konsep inilah yang kemudian dianggap sebagai suatu model yang terbaik, yang patut untuk dicontoh untuk negara kita.

Jika kita menengok kehidupan masyarakat etnis Bugis yang berdasarkan nilai-nilai budaya, memperlihatkan kecenderungan-kecenderungan yang relevan dengan konsep atau perilaku demokrasi yang kita kenal di dunia Barat. Hal tersebut nampak pada konsepsi kekuasaan *To-Manurung*, sebagai model kekuasaan yang di ikuti oleh gabungan negeri-negeri kaum.

Rekayasa kekuasaan pemerintahan berdasarkan konsepsi to Manurung itu, lahir dari wawasan dan cara pandang etnis Bugis abad XIV. Cara pandang tersebut bersumber pada mitologi *I La Galigo* yang bercerita tentang tiga tingkatan dunia. Dunia yang terdiri atas langit yang disebut *Botillangi'*, bumi atau dunia tengah yang disebut *lino* dan dunia bawah yaitu pertiwi yang disebutnya *todang-todang*.

Hal tersebut kemudian dianalogikan dengan konteks masyarakat yang juga tersusun dalam tiga lapisan. Lapisan atas adalah orang-orang dari keturunan *To-manurung*, lapisan tengah yaitu para pemimpin adat dan keluarganya serta lapisan ketiga adalah lapisan bawah rakyat atau *To-maradeka*.

Kehadiran *To-manurung*, kalau mengikuti cara pandang tersebut adalah untuk menunjukkan adanya tempat tinggal di dunia yang dipandang atau dipercaya sebagai langit, tempat yang tinggi tempat yang mulia, yaitu aspek atas dari dunia.

Konsep inilah yang kemudian diadopsi sebagai konsepsi pemerintahan kerakyatan yang disebut *Mangele' pasang Massolompawo*. Arti harfiahnya, yaitu dorongan kekuatan (air) pasang dari bawah, mengalirnya kembali (air) dari atas. Kemudian dimaknai sebagai kedaulatan dari bawah (rakyat) dan penganyom kekuasaan dari atas (Mattulada, 1975).

ANDI TENRI SOMPA —

BANGSAWAN
DAN KONVERSI
OTORITAS TRADISIONAL



Proses Konversi Otoritas Tradisional Elite Bangsawan Bugis

Konstelasi politik yang terjadi di Indonesia, ditandai dengan runtuhnya Rezim Soeharto yang dikenal sebagai Orde Baru. Hal tersebut mendorong lahirnya transisi demokrasi di Indonesia. Dalam konteks transisi demokrasi, isu identitas lokal mulai mengambil bagian penting dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan.

Elite bangsawan Bugis berupaya mempertahankan, memperebutkan dan mendapatkan legitimasi serta melakukan mobilisasi identitas terhadap masyarakat Sulawesi Selatan, ditengah maraknya isu demokrasi yang diperjuangkan seluruh bangsa di dunia.

Sparringa (2003), menuliskan bahwa sebagai sebuah gagasan politik, demokrasi pada dasarnya mengamankan satu diktum politik yang sangat universal, yakni hadirnya suatu sistem politik yang mampu mencegah pemusatan kekuasaan pada satu lembaga atau bahkan orang. Menyikapi fenomena tersebut, elite bangsawan Bugis berbenah diri dalam mempertahankan kekuasaan dalam bingkai nilai-nilai tradisional yang diaktualisasikan seiring perkembangan perpolitikan di Indonesia.

Relevan dengan kondisi tersebut, dalam konteks Indonesia, demokrasi haruslah berakar dari budaya bangsa sendiri. Dalam hal ini kita perlu menambahkan pula ke dalam konteks lokal yang dibangun dari kekhususan sejarah

ANDI TENRI SOMPA —

(historical specificity) (Gaffar, 1999; Hikam, 1999; Legowo, 2002; Sparringa, 2003).

Terlepas dari segala kecurigaan, keinginan berkuasa dan menguasai menjadi tumbal dari setiap perebutan kekuasaan dalam masyarakat manapun, tidak berbeda dengan elite bangsawan Bugis yang berusaha memanfaatkan momentum tersebut. Hal itu nampak dalam kehidupan sosial politik masyarakat Sulawesi Selatan. Kontrak sosial pun terlihat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang terjadi di Sulawesi Selatan.

Kontrak sosial yang dilakukan elite bangsawan Bugis, memberikan legitimasi bagi bertahtanya kekuasaan elite bangsawan dalam percaturan politik di Sulawesi Selatan. Untuk itu, dalam pembahasan ini penulis juga membahas bagaimana konstruksi sosial bangsawan Bugis tentang politik, meliputi kekuasaan, legitimasi, privat-publik, ideologi, kepentingan, negara, posisi bangsawan dalam struktur sosial, hubungan elite-massa, partisipasi politik massa serta demokrasi.

Hal tersebut akan memberi gambaran mendalam tentang elite bangsawan Bugis kontemporer, dalam memahami kehidupan berbangsa dan bernegara secara global, yang mengikuti perkembangan dunia modern serta tradisi nilai-nilai lama yang dikembangkan kearah demokrasi yang sesungguhnya, yang dibangun oleh budaya lokal.

Kita akan melihat, bagaimana elite bangsawan Bugis melakukan proses survival. Ketika seseorang telah berkuasa,

— ANDI TENRI SOMPA

maka ia tidak akan dengan senang hati menyerahkan kekuasaannya. Sebagaimana yang terjadi di Sulawesi Selatan, bahkan untuk melegitimasi kekuasaan terhadap rakyatnya, elite bangsawan Bugis sebagaimana ditulis Heddy (1988) yang juga diperkuat oleh Bailusy (1990), orang Bugis-Makassar mencoba melakukan konstruksi bahwa bangsawan itu dekat dengan sumber kekuasaan. Hal tersebut diwakili dengan adanya barang-barang bertuah yang disebut *Gaukang* dalam bahasa Bugis dan *Kalompang* dalam bahasa Makassar, yang dikonstruksi sebagai sumber kemakmuran.

Ketika arus demokratisasi melanda dunia ketiga, elite bangsawan Bugis tidak dapat menghindari. Ketika elite tersebut menentang arus demokratisasi, maka lambat laun akan terkalahkan. Sehingga, satu-satunya jalan untuk tetap eksis maka elite bangsawan Bugis harus dinamis melihat perkembangan dengan melakukan proses konversi di dalam masyarakatnya. Agar kekuasaan yang dimilikinya dapat dipertahankan dan diperebutkan untuk mendapatkan legitimasi.

Bagaimanapun juga, proses demokratisasi selalu diiringi dengan semakin terdidiknya masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Dengan semakin terdidiknya masyarakat dan konsep modern yang masuk dalam kehidupan rakyat Sulawesi Selatan, maka hal-hal yang menjadi alat legitimasi berupa hal-hal yang sakral mengalami desakralisasi.

Rakyat mulai tidak percaya pada keyakinan magis. Oleh sebab itu, elite bangsawan Bugis harus melakukan konversi.

ANDI TENRISOMPA —

Kekuasaan yang dulunya selalu dilindungi oleh hal-hal yang berbau sakral, sehingga hak kekuasaan melekat pada elite bangsawan Bugis, saat ini harus diselaraskan dengan ide-ide baru.

“Elite bangsawan Bugis setelah Soeharto turun, terjadi perubahan drastic. Jika sebelumnya, apapun yang dipesanan oleh penguasa selalu diikuti dengan kepatuhan. Saat ini, meskipun tidak sepenuhnya bergejolak, tetapi nampak adanya dinamika baru berdasarkan otoritas rasional. Otoritas tradisional sudah mulai luntur dikalangan mereka yang mau bangkit. Tetapi pada kenyataan yang ada, ayam jago cuma ada satu. Ketika elite bangsawan Bugis telah menitahkan, maka serta merta yang lain mengikuti. Meskipun demikian, telah ada perubahan dari otoritas tradisional ke otoritas rasional. Hal tersebut disebabkan oleh adanya dorongan kepentingan-kepentingan dari perubahan cara berpikir untuk melihat mekanisme sistem politik nasional yang berubah,” ujar seorang etnis pendatang dari kalangan intelektual di Makassar yang diwawancarai penulis, 28 Oktober 2003 lalu.

“Bangsawan, kalau tidak mau sekolah besok-besok tidak akan dihargai lagi. Sekarang banyak orang pintar, sekolahnya tinggi-tinggi. Biar juga keturunan raja kalau bodoh percuma, tidak ada gunanya. Meskipun kamu punya keluarga pejabat, tapi kamu tidak punya title, *naseng To ogie, mupakasiri' alemu, keluargae. Makkokoe narekko elo'ko ma'jaji tau massikola tanreko, nasaba' To tinggiemi sikolana u'ding ma'jaji pemimpin, makkokoe pemimpin maccae risappa. Itai, maegana To biasa ma'jaji Tau, makessing jamanna* (orang

— ANDI TENRI SOMPA

Bugis mengatakan bahwa kamu akan mempermalukan dirimu sendiri dan keluargamu. Sekarang, jika kamu ingin sukses,sekolahlah yang tinggi. Sebab hanya orang yang berpendidikan tinggi yang bisa memimpin. Sekarang yang dicari adalah orang yang pintar. Lihatlah, sudah berapa banyak orang sukses yang tidak berasal dari golongan bangsawan),” ujar seorang dari kalangan elite Bangsawan Bugis tradisional, menyikapi fenomena yang ada.

Meskipun gejala yang terjadi masih bersifat gradual dan muncul kenyataan bahwa di Sulawesi Selatan hanya ada satu ayam jago, akan tetapi menurut penulis, hal tersebut bagi elite bangsawan Bugis menjadi preseden buruk serta merupakan suatu ancaman bagi kelangsungan bertahtanya otoritas mereka.

Kenyataan itu juga menunjukkan adanya kesadaran dan mungkin suatu ketakutan bagi elite bangsawan Bugis, bahwa posisi mereka lambat laun akan pudar.

Hal tersebut tergambar jelas pada petikan wawancara dengan salah seorang elite bangsawan Bugis modern yang dilakukan penulis pada 3 Nopember 2003 lalu.

“Untuk mempertahankan budaya lokal agar tetap lestari, maka akan dibentuk dewan adat yang perangkatnya telah dipersiapkan. Insya Allah dalam waktu dekat akan terealisasi. Karena masyarakat kita merindukan yang namanya lembaga-lembaga adat. Kita ingin agar membangkitkan kembali nilai-nilai lama, tapi bukan feodalitas dan akan dikendalikan, jangan sampai bermental feodal. Seorang

ANDI TENRISOMPA —

bangsawan harus pintar, harus sekolah dan dirinya untuk rakyat. Jangan sampai dan yang terjadi sekarang adalah belum apa-apa sudah menghisap rakyat,” ujarnya.

Argumen tersebut sebelumnya telah dikukuhkan oleh seorang elite bangsawan Bugis yang ada dilingkup birokrat.

“..... Saya ingin membuat satu formulasi yang kemudian diberikan pola-pola, dimana nilai-nilai lama kembali ada. Hal ini sering saya diskusikan dengan para bangsawan Sulawesi Selatan. Apalagi masyarakat adat sekarang bergerak semua menuntut hak-haknya. Dan ini sebentar lagi akan kita polakan dalam satu pola mitra dengan pemerintah, yang nantinya disebut sebagai lembaga adat. Lembaga adat ini bekerja sama dengan Badan Perwakilan Desa di tingkat desa. Lembaga adat ini yang membimbing pikiran masyarakat desa dalam pembangunan dan mungkin para bangsawan entah itu murni atau berdarah campuran, tidak menjadi soal, kita akan tokohkan di desa dan diberi pelatihan untuk membangun desa. Jika ada yang ingin melekatkan *Andi*-nya (gelar bangsawan) sampai sepuluh kali, tidak menjadi soal, terserah,” ujar seorang bangsawan Bugis modern yang berkecimpung dilingkup birokrat saat diwawancarai oleh penulis pada 29 Oktober 2003 lalu.

Ia menambahkan, bahwa hal yang paling utama adalah, masyarakat sekarang melihat masih ada penghormatan dan itu kita manfaatkan dalam pembangunan.

“Nantinya, Badan perwakilan desa diwakili oleh Badan Perwakilan Adat di kabupaten dan ditingkat propinsi itu pusat

— ANDI TENRI SOMPA

lembaga adat dan akan diketuai oleh seorang bangsawan Bugis yang ahli dibidangnya serta intelektualnya tidak diragukan. Di lembaga adat itu akan dibentuk pula Dewan Ketahanan Budaya untuk melakukan seleksi budaya asing yang masuk dan mengontrol budaya yang berkembang, termasuk sisa-sisa feodalisme yang salah. Inilah yang akan dikontrol.....” tambahnya.

Apapun bentuknya, yang pasti tujuan yang ingin dicapai adalah merupakan hal positif. Terlepas dari semuanya uraian diatas berimplikasi pada upaya untuk mempertahankan otoritas tradisional yang dimodifikasi dalam bentuk yang lain.

Kesadaran elite bangsawan Bugis bahwa harus berbenah agar dapat tetap eksis, berupaya diwujudkan dengan mengikuti perkembangan dinamika masyarakatnya. Sehingga, elite bangsawan Bugis mendapat tempat dihati masyarakat Bugis khususnya dan masyarakat Sulawesi Selatan secara keseluruhan.

Dalam sebuah perebutan kekuasaan, apalagi kekuasaan itu dominan, sudah pasti ada golongan yang merasa tersegregasi oleh dominasi elite bangsawan Bugis di Sulawesi Selatan. Diungkapkan seorang intelektual politik (Unsur intelektual politik dalam Gustiana, 2001) bahwa di daerah Sulawesi Selatan terdapat empat etnis besar dan beberapa etnis kecil serta etnis pendatang yang mendiaminya. Bugis sebagai mayoritas lalu Makassar, Mandar dan Toraja.

Akan tetapi, presentasi mereka yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, tidak mewakili

ANDI TENRISOMPA —

keempat suku tersebut. Dominasi yang dilakukan etnis Bugis dan diskriminasi alokasi keterwakilan politik, telah terjadi. Kondisi tersebut tidak memberi ruang gerak bagi etnis lain, apalagi memberi peluang bagi distribusi kekuatan politik lokal dan nasional. Utusan daerah lebih banyak bahkan terwakili oleh satu etnis saja, yaitu Bugis.

Relevan dengan hal tersebut, juga diungkapkan oleh salah satu fungsionaris partai politik di Sulawesi Selatan.

“ Jika dilihat selama ini, presentasi untuk duduk menjadi orang nomor satu di Sulawesi Selatan belum pernah diduduki oleh orang Mandar atau Toraja. Kedudukan sebagai gubernur seolah-olah menjadi angan saja. Di tahun 1997 pernah terjadi dimana putera Mandar masuk menjadi kandidat gubernur yaitu Baharuddin Lopa dan Basri Hasanuddin, yang saat itu bersaing dengan Zainal Basri Palaguna yang beretnis Bugis. Dengan trik-trik politik elit local, menyebabkan kedua putera Mandar mundur dan Sulawesi Selatan lagi-lagi dipimpin oleh etnis Bugis. Ini bukti nyata bahwa etnis Mandar kurang diikuti sertakan dalam pemerintahan. Jika dilihat dari kemampuan kedua putera daerah Mandar tersebut mereka dapat dianggap sebagai putera daerah yang handal dan professional,” ujar seorang fungsionaris salah satu partai politik yang bukan dari etnis Bugis.

Kondisi-kondisi tersebut merupakan dinamika yang terjadi di Sulawesi Selatan. Keberanian mengungkapkan ketidakpuasan menjadi perkembangan baru bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa, elit

bangsawan Bugis mendominasi parlemen di Sulawesi Selatan. Data menunjukkan, 87% anggota parlemen berasal dari etnis Bugis.

Posisi-posisi strategis seperti Rektor di hampir semua universitas di Sulawesi Selatan dan kepala-kepala kantor, di dominasi oleh elit bangsawan Bugis. Kondisi inilah yang kemudian memicu isu dan upaya pemekaran wilaya. Ada upaya dari sebagian pihak yang ingin membentuk provinsi sendiri yaitu Sulawesi Barat atau mungkin pembentukan Luwu Raya.

Bagi etnis yang merasa tersegregasi, mereka beranggapan bahwa etnis lain tidak akan pernah berkuasa di Sulawesi Selatan. Etnis Toraja menurut pengamatan penulis, dalam elit strategis berada pada strata yang ketiga, begitu pula Mandar.

Secara formal, bargaining position itu tidak ada. Tetapi kondisi tersebut menjadi sebuah aturan main yang tidak tertulis (konvensi). Tetapi dengan adanya bentuk protes seperti upaya pemekaran wilayah, kondisi tersebut menjadi dinamika baru yang oleh elit bangsawan Bugis dan juga etnis Bugis secara keseluruhan, harus segera disikapi melalui manuver-manuver yang tidak lagi mengandalkan model lama.

Elit bangsawan Bugis berusaha mengaktualkan diri mereka melalui proses konversi, agar otoritas tradisional dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat luas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses konversi otoritas tradisional elit bangsawan Bugis dalam melakukan

ANDI TENRI SOMPA —

perubahan di wilayah publik, meliputi beberapa bentuk. Pada prosesnya, konversi itu dapat dipetakan sebagai berikut :

1. Terjadinya pendefinisian ulang kebangsawanan.
2. Diperlukannya pendidikan formal.
3. Melakukan perkawinan politik.
4. Mengupayakan mobilisasi identitas etnik.
5. Mempertahankan pola patron klien.
6. Menciptakan hegemoni baru terhadap etnis lain.

Pembentukan lembaga adat akan memperkuat posisi atau legitimasi otoritas tradisional. Dalam pemetaan diatas, pembentukan lembaga adat di Sulawesi Selatan tidak dimasukkan sebagai salah satu dari proses konversi otoritas tradisional.

Hal itu karena pada saat penyusunan tulisan ini berlangsung, lembaga tersebut masih dalam tataran wacana dan dalam persiapan kelembagaannya. Namun, jika pada perkembangan selanjutnya ternyata lembaga itu terealisasi maka lembaga adat tersebut juga merupakan salah satu motor bagi melembaganya otoritas tradisional di Sulawesi Selatan.

Pemetaan ini akan diuraikan lebih lanjut beserta data-data empiris yang ditemukan.

1. Redefenisi Kebangsawanan

Sebelum masuk pada proses konversi otoritas tradisional elite bangsawan Bugis dalam melakukan perubahan politik di wilayah publik yang sesungguhnya,

pendefinisian ulang terhadap label bangsawan juga perlu dicermati sebagai salah satu wujud kejelasan informasi tentang dinamika elite bangsawan Bugis itu sendiri.

Perkembangan masyarakat Sulawesi Selatan yang terhegemoni oleh kharisma bangsawan masa lampau, memberi legitimasi yang kuat bagi langgengnya otoritas tradisional.

Hal tersebut diungkapkan oleh Indo' Sakka' (nama samaran) dari kalangan rakyat biasa, “Kalau dilingkungan saya di Kabupaten Soppeng, *Arung* (bangsawan) sangat berpengaruh, pengaruhnya dalam pengangkatan kepala desa, Bupati, Camat. Karena masyarakat tidak mau diperintah kalau bukan oleh keturunan Arung. Kalau ada pengangkatan dari pusat seperti Camat atau lurah yang biasanya dari APDN atau STPDN, tapi itupun selalu keturunan Arung dari daerah lain yang masih daerah Bugis seperti dari Wajo dan Bone. Karena beda jika dia itu dianggap pernah memiliki keturunan darah biru, penerimaan masyarakat akan berbeda,” ujarnya.

“Seperti di kampung saya, tidak sembarang orang yang bisa memerintah. Kenapa? Karena masyarakat akan melawan, dia menganggap bahwa dia tidak layak untuk diperintah oleh Si A, Si B atau Si C, kalau memang turunannya itu ada turunan memerintah,” tambahnya.

Hal senada dikukuhkan oleh seorang elite bangsawan Bugis tradisional, “Oh, kalau ada yang mau jadi Bupati, jangankan Bupati, kepala desa saja tidak boleh sembarangan, kita harus tahu dia dari keturunannya siapa, itu harus jelas

ANDI TENRISOMPA —

jangan sampai kita diperintah Atatta' (dari golongan strata paling bawah)," ujarnya.

"Di Bugis sebenarnya jika kita mau melihat dari segi demokrasinya, sebenarnya sangat tinggi, hanya saja jika sampai tokoh-tokoh tradisional bangsawan itu menolak pernah kasus terjadi di Bone, setelah ketua DPRD dengan seorang mahasiswa pascasarjana UNHAS terpilih menjadi Bupati Bone, yang wakilnya dari segi status kebangsawanan dia lebih tinggi, bupati Bone terpilih adalah bangsawan menengah, sementara ada pasangan lain yang berasal dari bangsawan tinggi. Apa yang terjadi? Hampir 2-3 minggu setelah terpilih, Bupati dirongrong oleh masyarakat. Setelah saya amati dan konfirmasi ternyata kelompok bangsawan tinggi tidak menyetujui Bupati terpilih," seorang etnis non Bugis menambahkan.

Fenomena ini selanjutnya disikapi oleh masyarakat Sulawesi Selatan, bahwa untuk menjadi seorang pemimpin, seorang yang diteladani, seorang yang berkuasa, maka tercipta frame of reference bagi mereka bahwa materi dan pendidikan bukan satu-satunya alat legitimasi untuk mendapatkan prestise di Sulawesi Selatan. Dan ini juga hasil pengamatan penulis dalam jangka waktu yang panjang.

Argumen ini didukung oleh elite bangsawan Bugis modern, yang menyampaikan sebagai berikut, "Masyarakat umum juga terpengaruh oleh nilai-nilai kebangsawanan, sebagai contoh kita lihat X, sebagai kandidat salah satu jabatan politik tidak mampu merongrong Y yang terpilih yang pada

— ANDI TENRI SOMPA

saat itu terjadi beberapa kubu, tetapi X tidak mampu masuk ke dalam sistem yang sedang dibangun tempat di mana menentukan terpilih tidaknya X, X tidak dapat masuk dan tidak mampu merusak tatanan itu, itu artinya apa? Bahwa ada dukungan secara valid dari kelompok otoritas tradisional itu.... Anda mungkin tahu bahwa sudah menjadi rahasia umum bahwa *money politic* dalam sebuah perebutan kekuasaan itu pasti ada, dan siapa yang meragukan kekayaan yang dimiliki X dan dia siap untuk itu. X hanya memiliki kemampuan dana, tidak otoritas tradisional dalam arti tidak memiliki garis keturunan bangsawan,” ujarnya.

Penghargaan masyarakat akan jauh lebih tinggi jika seseorang itu, selain punya jabatan formal, berpendidikan, punya kekayaan dan yang utama dari semuanya adalah harus punya darah kebangsawanan. Elaborasi dari semua ini, akan menempatkan seseorang itu pada prestise yang sangat tinggi.

Perpaduan antara elite bangsawan dan elite intelektual, dan atau elite pengusaha, dan atau elite birokrat akan menaikkan derajat seseorang satu tingkat.

“Ini adalah suatu realitas, elite bangsawan ditambah elite apa saja ini akan menaikkan derajatnya satu tingkat. Saya misalnya hanya sebagai elite bangsawan, peran saya di masyarakat hanya sebagai tokoh informal, tidak dapat mengambil kebijakan, tetapi ketika saya sebagai elite bangsawan dan elite intelektual maka strata saya lebih naik lagi dan dalam posisi masyarakat lebih tinggi, dan nilai tawar untuk jabatan-jabatan strategis sangat mudah saya dapatkan,

ANDI TENRISOMPA —

begitu seterusnya,” ujar seorang elite bangsawan Bugis yang juga sebagai elite intelektual dan elite birokrat.

Seorang elite bangsawan Bugis menambahkan, “Sebagai contoh, pada saat saya mau menikah saya tidak punya uang, padahal sudah tahu kan bagaimana biaya yang harus dikeluarkan seorang laki-laki ketika mau menikah? Tetapi itu orang tidak mau lihat itu, yang jelas saya mau menikah. Dari segi pangkat saya tidak punya, dari segi materi saya juga tidak punya, tetapi ada gelar di depan nama saya (Andi). Andi sebenarnya tidak dapat diperjual belikan, tetapi jika elite bangsawan Bugis digabungkan dengan elite pendidikan itu lebih mantap,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, seorang elite bangsawan Bugis mengatakan, “Kita tidak dapat menyangkal, bahwa gejala itu masih melekat dalam masyarakat Sulawesi Selatan dan ini suatu relitas. Mungkin berbeda orang yang merasakan dan mengalami, saya ini dalam lingkup sosial, dan itu saya bisa masuki bisa menjadi kunci dalam banyak hal. Sebagai gambaran sewaktu saya KKN, pada waktu itu orang tidak tahu siapa saya, mereka hanya tahu saya mahasiswa KKN, yang namanya masyarakat disana belum tahu tidak memberi respon apa-apa terhadap saya,” katanya.

Ia menambahkan, “Tetapi tatkala saya diperkenalkan oleh kepala desa bahwa saya anaknya ini, kemudian keluarganya ini, apresiasi masyarakat terhadap saya menjadi lain elite bangsawan disana yang merupakan tokoh masyarakat itu langsung mengumumkan ke masyarakat lain bahawa ini keluarga saya tolong dijaga, tolong dibantu dan ini

terbukti. Pengaruh kebangsawanan itu luar biasa dalam kehidupan sosial masyarakat Sulawesi Selatan dan masih eksis sampai saat ini,” tambahnya.

Gejala ini sadar atau tidak, telah menjadi *style of life* bagi masyarakat di Sulawesi Selatan, gejala dan kondisi ini terserap dan cepat disikapi oleh etnis Bugis dibanding etnis lain. Tidak diketahui lebih jauh apakah kondisi ini hasil rekayasa atau konstruksi elite bangsawan Bugis itu sendiri dalam menciptakan frame di tengah masyarakat Sulawesi Selatan pada masa yang silam atukah murni dinamika masyarakat Sulawesi Selatan, yang jelas kenyataan itu ada. Untuk pemahaman lebih mendalam hal ini perlu penelitian lebih lanjut.

Frame yang tercipta dalam masyarakat Sulawesi Selatan, berimplikasi pada berbondong-bondongnya orang untuk berusaha memperoleh *prestise* tersebut. Status kebangsawanan akhirnya menjadi lahan perebutan bagi mereka yang meragukan status kebangsawanannya dan memanfaatkan momentum itu untuk mendapatkan legitimasi yang lebih tinggi dibanding mereka yang memiliki status kebangsawanan yang murni. Sehingga, perkawinan campuran antara bangsawan dan bukan bangsawan menjadi salah satu solusi untuk memperoleh legitimasi *prestise* tersebut.

Seiring terjadinya fenomena tersebut, maka perlu kiranya dilakukan pengkajian ulang atau mendefinisikan kembali arti kebangsawanan itu sendiri. Karena hal tersebut akan banyak berhubungan dengan nilai-nilai moral yang diyakini oleh masyarakat di Sulawesi Selatan, dimiliki oleh

ANDI TENRI SOMPA —

keturunan bangsawan, sehingga bangsawan sampai saat ini mendapat prestise ditengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan.

Oleh karena itu, konsep kekinian elite bangsawan murni seharusnya musnah bersamaan dengan hilangnya sistem kerajaan, karena sistem kerajaanlah yang telah mengklasifikasikan orang dalam berbagai lapisan, termasuk golongan bangsawan.

Akan tetapi, fenomena itu tidak dapat sirna begitu saja, bahkan sampai hari ini tetap mencari legitimasinya. Pengalaman sejarah telah menunjukkan, bahwa mereka yang berasal dari golongan bangsawan senantiasa memiliki perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Dan nilai-nilai moral itu, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Orang kebanyakan melihat bahwa semua bangsawan itu lebih tradisional, lebih otoriter. Tetapi dalam kehidupan keluarga saya tidak pernah dibangun sebuah otoriterisme, memang benar bahwa orang tua memberikan tekanan, tetapi dalam lingkungan keluarga raja memang ada semacam pembelajaran-pembelajaran politik. Kita diajarkan banyak hal, kita bisa belajar banyak karakter. Dari banyak karakter itu kita bisa saling rasa,” ujar seorang elite bangsawan Bugis modern dari kalangan intelektual.

Ia menambahkan, “Katakanlah kita dipersaudarakan, sewaktu kecil orang tua saya tidak menyusui saya, tetapi saya menyusui pada orang lain dan semua saudara saya seperti itu. Nilai-nilai apa yang ditanamkan pada kami, nilai-nilai

— ANDI TENRI SOMPA

persaudaraan yang sama, ada pemahaman dalam keluarga bahwa ada dua hal yang perlu, yaitu bagaimana kita membangun kepercayaan kepada orang lain. Tatkala kepercayaan itu kita bangun pada orang, maka orang itu akan percaya tapi jika kita tidak dapat membangun suatu kepercayaan, maka orang tidak akan percaya dan hubungan sosial akan hilang. *Resopa temmangingi, na malomoi pamase dewata* artinya bahwa hanya kerja keraslah sumber rejeki, bagaimana cara kita membangun hubungan-hubungan sosial, itu adalah sumber rejeki, dan itu ditanamkan di dalam keluarga. Kamu harus menghargai orang, karena ketika banyak yang tinggal di rumah, saya jangan otoriter, seenaknya saja menyuruh orang. Bagaimana saya harus memanggil orang antara ini dan ini, ada aturannya bukan berarti saya melakukan klasifikasi, tetapi itu ada aturan yang saya anggap sebagai pembelajaran dan menjadi tatanan nilai-nilai sosial, jika dia betul-betul bangsawan murni, maka nilai-nilai itu akan muncul,” tambahnya.

Menyambung uraian panjang diatas, seorang elite bangsawan Bugis tradisional mengatakan, “*Ade'na nappapuang*, artinya nilai-nilai tradisilah yang kita gunakan sehari-hari yang menunjukkan kebangsawanan kita, meskipun kamu berteriak bangsawan, tetapi tutur kata, prilaku dan pekertimu tidak menunjukkan kebangsawanan, maka kamu bukan bangsawan yang sesungguhnya, karena bangsawan itu, memiliki rasa malu untuk melakukan sesuatu yang melanggar norma dan itu harus ditanamkan sejak lahirnya seorang *Arung* (bangsawan),”

ANDI TENRI SOMPA —

Bagaimanapun juga, garis keturunan yang tidak bernoda itu adalah kebangsawanan asli, dalam arti bangsawan murni (Bloch dalam Kartodirdjo, 1981). Agar dianggap bangsawan, orang harus membuktikan bahwa diantara nenek moyangnya tidak seorangpun yang berkedudukan sebagai budak. Bangsawan murni di jaman dahulu adalah lapisan raja beserta sanak keluarganya, yang dalam silsilah Bugis disebut *Anakarung*, kecuali Wajo ada satu lapisan lagi di atasnya yang disebut *Ana' Mattola* (Zainal, 1985: Mattulada, 1985).

Garis keturunan masyarakat Sulawesi Selatan yang dulunya patriarki dan untuk menyandang gelar kebangsawanan Bapak dan Ibu harus berasal dari keturunan bangsawan pula, dengan adanya dinamikan perkembangan masyarakat hal ini menjadi tidak jelas.

Dibeberapa kalangan elite bangsawan Bugis masih patuh dengan aturan tersebut, bahwa garis keturunan bapaklah yang menentukan derajat kebangsawanan seseorang. Tetapi di banyak kalangan yang juga mengklaim diri sebagai elite bangsawan, karena melihat tuntutan perkembangan masyarakat sudah menjadi *style of life* hal ini telah menyimpang jauh, yang dalam tulisan ini diberi label sebagai pseudo-bangsawan, yang tingkat kebangsawanannya rendah, dalam arti perkawinan campuran yang sudah tidak jelas, karena kebutuhan prestise seperti yang dijelaskan diatas.

Pseudo-bangsawan inilah yang memanfaatkan momentum sebagai *free rider* (pembonceng gratis) dalam konstelasi konversi otoritas tradisional elite bangsawan Bugis. Yang sangat menonjol adalah dalam konteks perkawinan,

seseorang yang bukan dari golongan bangsawan utamanya kaum laki-laki akan mencari wanita dari kaum bangsawan, sehingga selain anak-anak mereka nantinya diberi gelar bangsawan.

Kaum laki-laki tadi juga mendapat legitimasi, apalagi ketika dia memiliki materi, karena si istri mempunyai gelar maka sang suamipun menobatkan diri dengan sapaan yang sama dengan sapaan kepada istrinya. Dalam masyarakat Bugis disapa dengan gelar Puang sebagai sapaan bangsawan.

Hal tersebut didukung oleh penuturan Ambo (nama samaran) yang mengatakan, “Sebenarnya jika bangsawan murni yang memerintah sekarang itu lebih bagus hanya bangsawan yang tidak mengetahui sejarah kebangsawanannya dan posisi bangsawan dulu itu yang menjadi salah, kemudian mau menjadi raja lagi seperti dulu. Tapi bangsawan yang memang punya sikap dan sungguh-sungguh murni dari kerajaan dan dia menduduki jabatan di dunia modern itu lebih bagus. Akan tetapi sekarang banyak bangsawan palsu atau setengah bangsawan yang lebih menonjolkan diri dan sering mengangkat dirinya sebagai bangsawan murni. Yang seperti inilah yang oleh orang Bugis disebut *naseng Ogi'e kalao-lao (over acting)*,” katanya.

“Elite bangsawan yang tidak murni, jelas terlihat ini yang selalu demonstratif, selalu berpenampilan bangsawan, baik dalam politik maupun dalam jabatan. Tidak demikian dengan yang murni lebih sadar pada posisinya dan tidak menonjolkan kebangsawanannya, karena tanpa dia berkata masyarakat sudah tahu,” seorang etnis lain membenarkan hal tersebut.

ANDI TENRI SOMPA —

Kenyataan ini membuktikan bahwa pseudo-bangsawan dalam kesehariannya menunjukkan sifat, dimana gelar kebangsawanan selalu ingin dilekatkan tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi yang pantas.

Jika kita ke Sulawesi Selatan dan masuk ke kantor-kantor bahkan lembaga pendidikan tinggi sekalipun, sapaan yang digunakan untuk atasan bukan lagi sapaan formal seperti Pak/Bapak atau Bu/Ibu, melainkan *Puang* (gelar bangsawan), tidak asing ditelinga kita. Ramlah Surbakti pernah menyebutkan nama salah satu institusi Perguruan Tinggi terkemuka di Sulawesi Selatan, bahwa itu milik orang Bugis.

Pseudo-bangsawan inilah yang merupakan hasil redefenisi dari arti kebangsawanan yang sesungguhnya, yang telah mencuri start melegitimasi dirinya menjadi elite bangsawan Bugis kontemporer. Gelar kebangsawanan setelah memiliki faktor pendukung lainnya (atau salah satu dari komponen materi, pendidikan dan jabatan struktural), menjadi *style of life* masyarakat Sulawesi Selatan, utamanya etnis Bugis.

2. Pendidikan Formal

Dalam upaya mempertahankan dan memrebut kembali kekuasaan serta mendapatkan legitimasi atau dengan kata lain, proses konversi otoritas tradisional elite bangsawan Bugis elite dan elite pseudo-bangsawan agar tetap eksis mengikuti dinamika perkembangan jaman, maka pendidikan formal menjadi salah satu parameternya.

— ANDI TENRI SOMPA

Tingkat pendidikan dan keturunan yang menjadi aturan tak tertulis ini, akan menaikkan derajat seseorang dimata masyarakat Sulawesi Selatan. Faktor keturunan ini yang berperan, karena meskipun berpendidikan tetapi keturunan orang biasa, maka kurang mendapat simpati dari masyarakat.

Mereka yang bangsawan adalah karena nenek moyang mereka pada jaman dahulu memiliki posisi-posisi dan fungsi tertentu dalam masyarakat, sehingga ia memperoleh pengakuan akan keberadaannya secara turun-temurun. Meskipun telah terjadi pergeseran nilai-nilai, tetapi kalangan elite bangsawan Bugis tetap diakui sebagai tokoh yang mempunyai pengaruh yang kharismatik.

Elite bangsawan Bugis yang telah berpendidikan ini yang kemudian berusaha menjembatani setiap keinginan masyarakat kepada pemimpin atau penguasa setempat. Elite bangsawan inilah yang memberikan penjelasan-penjelasan terhadap maksud dan tujuan penguasa Sulawesi Selatan.

Selain elite bangsawan Bugis juga sebagai pendukung dan penghubung komunikasi antara penguasa dengan masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, elite bangsawan Bugis juga memberi motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Hal inilah yang banyak dilakukan oleh elite bangsawan Bugis. Untuk mengaktualkan kondisi tersebut mereka membentuk satu kelompok kepentingan yang cukup intens keberadaannya ditengah masyarakat. Kesadaran akan perlunya pendidikan bagi elite bangsawan Bugis, dijelaskan

ANDI TENRISOMPA —

secara gamblang oleh seorang elite bangsawan tradisional, “Saat ini masyarakat juga sudah terjadi perkembangan, pengetahuan rakyat semakin tinggi juga, rakyat sudah mulai pintar. Jadi sekarang tidak bisa serta merta kita gunakan nilai-nilai lama, kita juga harus meningkatkan kemampuan di bidang kualitas pendidikan. Karena dalam suatu pengangkatan ada satu istilah kuda ini bersamaan lari, tapi kita harus menonjolkan kriteria yang lain,” katanya.

Ia menambahkan, “Disini kalau kita punya kualitas pendidikan yang sama dalam sebuah pemilihan kita punya nilai yang lain, ya seperti kalau kita keturunan bangsawan. Coba dengan kalau ada pengangkatan dan terpilih *kaalu di Ana' Arung* (gelar bangsawan) pasti orang akan berkata: “Oh, wajar memang karena orang tuanya dulu dipercaya, wajar cocok memimpin kita memang *wija Arung, wija* pemimpin (keturunan bangsawan, keturunan yang memerintah). Dan yang penting bagaimana menjalin hubungan baik dengan masyarakat,” tambahnya.

Implikasi positif dari konversi otoritas tradisional ini dan menjadi satu proses yang harus terlewati dalam transisi demokrasi, yaitu elite bangsawan Bugis yang telah berpendidikan tinggi, tetapi jumlahnya masih sangat minim adalah beralihnya otoritas tradisional ke otoritas rasional. Hal ini dikuatkan oleh data yang diperoleh di lapangan, sebagaimana disampaikan seorang elite bangsawan dari birokrat.

“Pada saat pemilihan Gubernur kemarin, ada satu orang anggota Dewan yang tidak menginginkan terpilihnya Amin

— ANDI TENRI SOMPA

Syam menjadi Gubernur Sulawesi Selatan dan dia berani melakukan perlawanan dengan melakukan demonstrasi. Anggota Dewan tersebut menginginkan adanya pembaharuan dari segi kepemimpinan di Sulawesi Selatan,” ujarnya.

“Sebelum Pak Harto turun semua bangsawan Bugis mentaati apa yang dikatakan elite bangsawan Bugis yang menjadi nomer satu di Sulawesi Selatan, tetapi setelah Pak Harto turun, apa yang dikatakan oleh orang nomer satu ini, yaitu “sesudah saya sebaiknya yang tertua...” Tidak semua bangsawan Bugis menerima begitu saja, muncul dinamika baru dari kalangan mereka yang telah berpendidikan dan menginginkan pembaharuan,” ujar seorang dari etnis non Bugis menambahkan.

Apa yang disampaikan dua orang diatas, memberikan gambaran tentang gejala otoritas tradisional yang mulai luntur dan muncul rasionalisasi sebagai dorongan kepentingan-kepentingan dari perubahan cara berpikir untuk melihat mekanisme sistem politik nasional yang berubah.

Akan tetapi, mereka yang mau bangkit hanya segelintir dan tidak mampu menghadapi status quo otoritas tradisional. Perlawanan-perlawanan seperti ilustrasi diatas muncul dari elite bangsawan Bugis generasi muda.

Tanpa menampik semuanya sebagai suatu proses, kondisi tersebut menjadi hal yang menggembirakan dalam perkembangan masyarakat Sulawesi Selatan kedepan.

3. Perkawinan Politik

Strategi yang dilakukan elite bangsawan Bugis dalam mengkonversikan otoritas tradisionalnya, dengan kata lain berupaya mempertahankan, memperebutkan kembali legitimasi tradisional untuk mendapatkan legitimasi formal dengan melihat dinamika perkembangan di Sulawesi Selatan yang masih memperdebatkan aliran darah, dalam hal ini garis keturunan.

Untuk mempertahankan garis keturunan itu dan menaikkan derajat kebangsawanan, maka perkawinan politik menjadi salah satu agenda dalam upaya mempertahankan status kebangsawanan.

“Supaya keturunan itu tidak hilang, maka banyak sekarang *ana' Datu* (anak bangsawan) dikawinkan dengan anak pejabat ini, biasanya antara anak raja dengan anak pejabat atau dari keturunan *Tau Daceng* (orang baik) yang berpendidikan tinggi, karena pejabat yang mengawinkan anaknya dengan keturunan bangsawan juga akan mendapatkan legitimasi, derajatnya menjadi naik di mata masyarakat,” ujar seorang elite bangsawan Bugis modern.

“Banyak sekarang ini, anak Datu ini dikawinkan dengan anak pejabat ini biasanya kan antara raja dan pejabat, dan pejabat juga akan mendapat nama baik,” seorang elite bangsawan Bugis tradisional menambahkan apa yang disampaikan elite bangsawan Bugis modern diatas.

Perkawinan politik, saat ini menjadi trend pada kalangan elite di Sulawesi Selatan. Kiranya, trend ini merupakan salah

satu proses mempertahankan kekuasaan elite bangsawan Bugis dengan mengkonversikannya lewat perkawinan politik.

4. Mobilisasi Identitas Etnik

Pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah saat ini membutuhkan keikutsertaan dan kepedulian dari elite bangsawan Bugis, dalam hal pembangunan yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Demikianlah paling tidak yel-yel yang dikumandangkan oleh penguasa di Sulawesi Selatan pada masa Orde Baru.

Keterlibatan anggota masyarakat dalam kegiatan pembangunan, dapat dibedakan atas partisipasi dan mobilisasi berdasarkan inisiatif, spontanitas, dan kesukarelaan anggota masyarakat.

Meskipun dalam kenyataan sehari-hari kedua konsep tersebut sulit untuk dibedakan, karena keduanya merupakan abstraksi dari tingkah laku masyarakat dan kedua tingkah laku tersebut sama-sama mempunyai implikasi penting terhadap sistem politik.

Harapan dari elite bangsawan Bugis adalah dari semua partisipasi politik masyarakat yang dimobilisasikan dan diharapkan mampu untuk bertingkah laku dengan cara-cara tertentu. Dimana mereka atau masyarakat bertindak atas instruksi yang sebagian besar digerakkan oleh loyalitas, rasa cinta, rasa hormat atau rasa takut terhadap seorang pemimpin dalam hal ini elite bangsawan Bugis, atau oleh hasrat untuk memperoleh manfaat yang mereka percaya.

ANDI TENRISOMPA —

Ikatan-ikatan tradisional adalah ikatan-ikatan antara sejumlah pengikut dan seorang pemimpin yang ditentukan, bahkan oleh tradisi kebudayaan, sosial atau agama. Demikian juga halnya yang terjadi dengan keberadaan elite bangsawan Bugis di Sulawesi Selatan. Peranan elite bangsawan Bugis dalam segala hal, utamanya dalam kehidupan sosial ekonomi sangat memegang peranan yang signifikan dalam hal memobilisasi masyarakat (Tutriani, 1997).

Dalam memobilisasi masyarakat, elite bangsawan Bugis melakukan berbagai upaya-upaya. Memberi dorongan dan motivasi bagi masyarakat, menghilangkan sistem feodalisme melalui cara-cara persuasif kekeluargaan. Proses interaksi bangsawan Bugis dalam masyarakat melalui cara komunikatif, artinya tidak menggunakan power seperti jaman feodal, tetapi cenderung menopang pembangunan di era reformasi ini. Hal ini dikarenakan para bangsawan masih ingin statusnya tetap bertahan, sebagaimana disampaikan oleh seorang dari golongan biasa.

“Saat ini bangsawan yang berusia lanjut, tingkat kepeduliannya terhadap politik sangat rendah karena dipengaruhi faktor usia. Sementara itu bangsawan berpendidikan, tingkat kepeduliannya terhadap politik sangat besar bahkan sebagai kiblat bagi terciptanya proses pengambilan keputusan politik bagi masyarakat Sulawesi Selatan, kondisi ini pun tak lepas dari dukungan masyarakat yang melihat dan mampu menilai bahwa golongan bangsawan ini sudah beradaptasi dan mampu merealisasikan keinginan dan aspirasi masyarakat,” katanya.

— ANDI TENRI SOMPA

Uraian diatas merupakan proses konversi otoritas tradisional elite bangsawan Bugis, melalui mobilisasi identitas, mobilisasi identitas ini bahkan sudah melembaga sejak lama, sebagaimana penjelasan seorang budayawan yang juga sebagai elite bangsawan Bugis.

“Awal pemerintahan di Sulawesi Selatan itu dikuasai etnis Makassar, pada waktu itu Bugis tidak mampu memerintah di Sulawesi Selatan. Nanti setelah ada perkumpulan orang Bugis yaitu BOSOWA, baru perlahan-lahan Bugis bangkit dan menjadi dominan dalam berbagai hal,” katanya.

Ada banyak lembaga yang menyatukan elite bangsawan Bugis di Sulawesi Selatan dan mereka sangat solid menjaga dan mempertahankan lembaga tersebut. Seperti Bosowa, Sipilu, kelompok-kelompok ini awalnya adalah persatuan etnis Bugis yang pengembangannya melalui bidang ekonomi. Saat ini organisasi tersebut menjadi alat legitimasi politik ketika melakukan bargaining position pada tingkat pengambilan keputusan.

5. Patron Klien

Penelitian pertama kali tentang hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan adalah Prof. H.Th. Chabot, yang menggunakan istilah sistem pengikut. Sistem ini didasarkan atas kesadaran bahwa meskipun dikuasai oleh atasan, namun kedua belah pihak saling memerlukan. Menurutnya pula, bahwa hubungan yang tidak setara antara seorang tuan

ANDI TENRISOMPA —

dengan sejumlah bawahan. Hubungan yang tidak setara itu adalah hubungan antara mereka yang sama tinggi kedudukan sosialnya adalah hubungan persaingan, karena selalu mau mengalahkan yang lain (Chabot, dalam Pelras; 1981).

Pengkajian masalah hubungan Patron Klien ini mencakup berbagai masyarakat diberbagai tempat di dunia ini, gejala ini rupanya tetap bertahan di daerah-daerah yang sudah mengenal potilit demokrasi atau sistem politik yang dapat berfungsi dengan baik.

Penelitian tentang Patron-Klien ini telah banyak dilakukan oleh ahli-ahli dari dalam dan luar Indonesia. Seperti Cristian Pelras (1967) yang masih dalam stensilan meneliti tentang budaya orang Wajo yaitu Patron-Klien, Heddy Shri Ahimsa Putra yang menerjemahkan hubungan patron klien di Sulawesi Selatan sebagai konsep minawang yang dalam arti bahasanya berarti “ikut”, yang menurut pemaknaannya berarti hubungan patron klien yang mendeskripsikan sejarah patron klien yang dihubungkan dengan kondisi sosial di Sulawesi Selatan.

Sebagaimana Weber menjelaskan tentang otoritas tradisional, yaitu kepatuhan bangsawan, sangat relevan dengan konteks ini. Hubungan tradisional berdasarkan *Punggawa-Sawi* (patron-klien), unsur kepatuhan di sini adalah hubungan otoritas tradisional di sisi yang lain terdapat unsur otoritas rasional yaitu ketaatan yang sesuai dengan aturan yang kemudian mengkonstruksi otoritas tradisional. Pada masa lampau kepatuhan *ata* (budak) terhadap rajanya

merupakan kepatuhan terhadap atasan yang tidak didasarkan pada satu aturan yang riil, tetapi disebabkan oleh terposisinya mereka pada kelas-kelas.

“Kenapa di Sul-Sel, Golkar selalu menang? Karena Golkar pintar melihat siapa yang ditunjuk untuk membantunya berkampanye. Dulu orang tidak suka dengan Golkar, pindah ke PDI Perjuangan, tapi begitu ada bendera Golkar di depan rumah Arung A (seorang elite bangsawan) kita semua merasa bahwa betapa berdosanya kita jika kita berkhianat memilih yang lain, maka dari mulut ke mulut akhirnya memilih Golkar,” ujar seorang dari etnis Bugis biasa.

“Di Soppeng, jika bapak saya pilih Golkar, semua yang pernah tinggal di rumah dan yang garap sawah pasti pilih Golkar, Bapak saya tidak pernah menyuruh mereka, tapi mereka sendiri yang mau,” seorang elite bangsawan Bugis Intelektual menambahkan.

Kondisi seperti itulah pola patron klien di Sulawesi Selatan, orientasi afektif, dimana perasaan, kedekatan, emosional masih tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga pernah dipertanyakan oleh Amin Rais, mengapa seperti itu, padahal pendidikan mereka pun sudah tinggi, bahkan tak jarang dari mereka yang sekolahnya sudah pada jenjang sarjana, sesuatu yang antagonis.

Padahal disatu sisi sudah berpendidikan seharusnya rasional, tapi disisi yang lain ada nilai kultural. Nilai ini sebenarnya juga satu potensi yang dapat mempersatukan masyarakat Sulawesi Selatan, apabila terakomodasi.

ANDI TENRISOMPA —

Dalam proses konversi otoritas tradisional elite bangsawan Bugis ini, pola patron klien sebagai pola lama masih diteruskan oleh elite bangsawan Bugis, tetapi tidak lagi dengan versi yang lama seperti kepatuhan antara raja dan budaknya. Pola hubungan yang diciptakan lebih bersifat kekeluargaan, seperti mempekerjakannya di kantor-kantor ataupun elite bangsawan Bugis membiayai sekolahnya sampai ke jenjang sarjana, sehingga hubungan jasa senantiasa ada.

Klien akan selalu mengenang jasa patronnya. Budi baik yang telah diberikan oleh patron tidak harus dibalasnya dengan berapa biaya yang telah dikeluarkan patron kepada kliennya, tetapi sebagai klien yang tahu diri akan selalu “menundukkan kepalanya” kepada patronnya, setinggi apapun pendidikannya. Dan tak jarang patron akan merekomendasi kliennya untuk duduk dalam posisi tertentu, ketika secara kualitas si klien punya kapabilitas.

Sebagaimana dikatakan seorang elite bangsawan Bugis modern, “Disini, hubungan punggawa-sawi (patron klien) adalah budaya kita sampai hari ini, sehingga demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik, karena demokrasi akan berjalan dengan baik, jika orientasi horisontal dalam budaya Bugis saling menghargai (sipakatau), tetapi yang dominan sekarang justru hubungan vertikal yaitu *punggawa-sawi*, di bidang kekuasaan dulu itu namanya *ajjoareng-joa'* (Bapak-anak buah),” katanya.

Seorang dari kalangan elite Bugis biasa menambahkan, “Kalau *Punggawa* pilih partai A, kita *Sawinya* juga ikut, bagaimana tidak semua keperluan saya ditanggung *Puang*,

— ANDI TENRI SOMPA

anak saya sakit, pesta kawin, saya dibelikan TV, bahkan rumah saya diperbaiki semua biayanya dari Puang,” tambahnya.

Apa yang disampaikan dua nara sumber diatas, memperkuat argumen bahwa hubungan patron-klien di Sulawesi Selatan tumbuh subur. Tanpa kesepakatan tertulis, klien ini patuh dan taat pada patronnya. Sebagaimana diutarakan sebelumnya tentang *style of life* umumnya masyarakat Sulawesi Selatan, ketika si klien tadi sudah memiliki pendidikan dan jabatan struktural, maka untuk menaikkan derajatnya dia akan mencari istri yang berasal dari golongan elite bangsawan.

Inilah yang disebut dengan pseudo-bangsawan. Implikasi dari kondisi ini, sebenarnya salah satu faktor lahirnya pseudo-bangsawan Bugis adalah elite bangsawan Bugislah yang sadar atau tidak, yang telah menciptakan pseudo-pseudo-bangsawan dengan menyetujui perkawinan campur tersebut, sebagai proses konversi mempertahankan otoritas tradisional dan sebagai upaya survival tanpa harus kehilangan penghargaan.

6. Hegemoni Baru

Fenomena yang terjadi saat ini, hubungan tradisional dan hubungan emosional menjadi hal mendasar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan. Hubungan tradisional yang dimaksudkan adalah adanya persamaan identitas, kerekatan persaudaraan dan mempunyai garis keturunan bangsawan. Sementara hubungan emosional yaitu

ANDI TENRISOMPA —

keberadaan seseorang dalam suatu organisasi tertentu, misalnya sama-sama berada di partai Golkar. Kondisi ini memberikan peluang ganda bagi seorang calon pemimpin di daerah Sulawesi Selatan.

Elite bangsawan Bugis juga cerdas dalam melakukan manuver-manuver politik agar dapat diterima dikalangan mereka yang bukan dari etnis Bugis. Meskipun ada resistensi seperti permohonan pemekaran wilayah, tetapi pada umumnya mereka telah terhegemoni oleh yel-yel yang dibuat oleh elite bangsawan Bugis.

Apakah melalui pendekatan emosional, berikut wawancara dengan seorang etnis lain, “Orang yang menjadi calon seperti Amin Syam (Gubernur terpilih), jika didukung oleh elite bangsawan Bugis itu adalah hal yang biasa, tetapi jika yang mendukung dari etnis lain dan etnis tersebut juga punya calon, bagaimana? Mandar misalnya mendukung Amin Syam, karena Amin Syam telah memupuknya sejak lama melalui Golkar,” ujar seorang dari etnis lain.

“Amin Syam dekat dengan masyarakat kita, kepemimpinannya sudah kelihatan di Golkar, siapa yang meragukan kemampuannya? *Palaguna* (Gubernur lama) juga mendukung Amin Syam, kerjanya di Golkar sudah kelihatan, dia peduli dengan suku lain,” seorang dari etnis lain menambahkan.

Hubungan tradisional, yaitu kerekatan kekerabatan dan hubungan emosional harus berpadu untuk dapat menjadi elite nomer satu di Sulawesi Selatan. Kepiawaian elite bangsawan

— ANDI TENRI SOMPA

Bugis membaca peta perpolitikan di Sulawesi Selatan, memberi legitimasi pada tercapainya posisi puncak dalam sebuah perebutan kekuasaan.

Sebagaimana data berikut, “Pada jaman Amiruddin yang diperkenalkan adalah kearifan lokal, Rektor Unhas kemandirian lokal, *Palaguna* mencoba dengan nilai-nilai *sipakatau* (saling menghargai), Amin Syam dengan *Ewako* (berani). Mereka ini adalah orang-orang yang berpendidikan dan hidup dengan gaya modern, serta disiplin militer, tetapi toh tetap harus kembali ke nilai-nilai lama, karena itu tidak akan pernah lekang dengan panas. Itulah motivasi yang selalu melekat di hati masyarakat, nilai siri'na pesse (rasa malu dan perasaan iba) yang dimiliki setiap etnis di Sulawesi Selatan harus selalu ada pada jiwa seorang pemimpin.”

Melalui simbol-simbol lokal yang mulai dinasionalkan, akan menghegemoni etnis lain untuk mendukung elite bangsawan Bugis menuju puncak kekuasaan. Sebagian dari mereka ada yang terbangun dari belai manis elite bangsawan Bugis dan sadar bahwa etnis lain akan teramat sulit untuk menjadi elite penguasa di Sulawesi Selatan, lebih eksplisit nampak pada hasil penelitian Gustiana (2001).

Telah ditemukan fakta bahwa kemampuan ekonomi dalam berpartisipasi elite bangsawan Bugis dalam upaya mewujudkan pembangunan politik tersebut merupakan sumbangan dana, daya dan usaha mereka. Status sosial mereka dengan kedudukan sebagai elite bangsawan Bugis sebagai seorang yang terhormat dan terpandang dimata

ANDI TENRISOMPA —

masyarakat, sehingga tidak banyak hambatan sepanjang tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.

Masyarakat secara suka rela ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan dengan demikian memudahkan elite bangsawan Bugis untuk membina kerukunan dengan masyarakat. Karena pengaruh elite bangsawan Bugis status sosialnya nampak dirasakan oleh masyarakat.

Konstruksi Sosial Elite Bangsawan Bugis Tentang Politik

Untuk tetap eksis, konversi otoritas tradisional elite bangsawan Bugis dalam upaya untuk tetap mempertahankan, memperebutkan dan mendapatkan legitimasi, di wilayah publik harus dilengkapi dengan paradigma baru yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan masyarakat Sulawesi Selatan.

Sejalan dengan kondisi tersebut, melalui wawancara mendalam diperoleh konstruksi sosial elite bangsawan Bugis tentang politik yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Kekuasaan

Menurut elite bangsawan Bugis, kekuasaan tidak dapat diperoleh begitu saja. Untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan harus melalui orang-orang, artinya untuk mencapai suatu tujuan harus melalui delegasi.

Kekuasaan intinya adalah bagaimana menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan, tanpa harus melihat secara ketat, jadi bukan suatu otoritas penuh yang bersifat sentralistik. Tetapi yang dilihat adalah sejauh mana loyalitas seseorang kepada pemerintah (raja) dan dalam loyalitas itu ada sebuah pertukaran-pertukaran sosial.

Artinya, dalam mempergunakan kekuasaan ada kontrol dari lembaga lain yang melihat kondisi kesejahteraan, yaitu ada pemerintah (raja) dan para Dewan Adat yang posisinya

ANDI TENRISOMPA —

sangat diagungkan, yang turut menentukan suatu keputusan. Kekuasaan harus berasal dari orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria yang secara geneologis pantas untuk memimpin, yang ditentukan masyarakat. Mungkin bersifat monarki, tetapi bukan monarki yang absolut, melainkan yang diperuntukkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Kekuasaan yang dimiliki pemerintah, jika tidak mampu mensejahterakan rakyat maka harus turun dari pemerintahannya. Jika tidak, maka rakyat yang akan menghukumnya yang dalam bahasa Bugis disebut dipaoppangitanah.

Artinya, bagi pemerintahan yang gagal apalagi korup harus ditinggalkan oleh rakyatnya, sehingga pengakuan kekuasaan itu berasal dari rakyat. Mereka yang ingin berkuasa tidak hanya kekayaan materi yang diharapkan, tetapi juga penghargaan berupa nama baik.

2. Legitimasi

Menurut elite bangsawan Bugis, legitimasi itu adalah pengakuan dan terdapat penerimaan dari masyarakat. Berbagai macam jenisnya ada yang bersifat legitimasi tradisional, kualitas pribadi, instrumental dan ideologis yang biasanya yang bersifat agama. Sebaiknya, dasar sebuah legitimasi jangan bersifat tunggal. Sebaiknya jika dia bangsawan, maka jika dia tidak kaya harus pintar. Jangan pernah memilih seseorang hanya karena satu dasar legitimasinya, minimal dia harus memiliki dua dasar legitimasi.

3. Privat - Publik

Bangsawan privat dan bangsawan publik sulit dipisahkan. Yang selalu melekat adalah, dia merupakan bangsawan. Yang sangat nampak adalah pseudeo-bangsawan yang selalu mencari justifikasi karena selalu merasa kurang. Tetapi elite bangsawan Bugis yang sesungguhnya, apapun pengakuan dan penerimaan masyarakat selalu diterima dalam perilaku tidak menonjolkan diri, karena kebangsawanan adalah pengakuan publik.

4. Ideologi

Ideologi yaitu mempunyai sistem nilai yang sangat ketat. Dalam arti ideologi bangsawan Bugis itu ada semacam satu sistem nilai yang mengikat mereka, ketika menyelesaikan permasalahan. Nilai selama ini tertanam ketika dia masih kecil yang diajarkan di rumah, kemudian berlanjut secara turun temurun.

5. Kepentingan

Kelompok kepentingan, dalam masyarakat Sulawesi Selatan khususnya etnis Bugis memiliki yang namanya Ajatapareng, Bosowa, Sipilu. Harus ada wadah yang menampung aspirasi mereka. Kelompok kepentingan itu tidak bersifat inklusif juga eksklusif, karena dalam kepentingan itu ada pertukaran-pertukaran, dalam konteks tertentu ada perkawinan politik.

6. Negara

Negara menurut elite bangsawan Bugis, harus memiliki kedaulatan dan mempunyai suatu otoritas penuh dan yang utama memiliki nasionalisme lokal yang kemudian dibawa ke tingkat nasional. Etnis Bugis senantiasa lebih menyebut kekhususannya dari pada negaranya yang besar.

7. Politik Bangsawan dalam Struktur Sosial

Seorang bangsawan kadang over confidence. Bangsawan membangun suatu stratifikasi, unsur kepatuhan dalam diri bangsawan selalu ditekankan pada masyarakat. Simbol-simbol penghargaan selalu ditekankan, dengan penyapaan yang selalu menekankan pada penyebut gelar Andi atau Puang. Sehingga ketika sebutan itu dipakai, terkesan ada penghargaan dan nampak kepatuhan. Sapaan itulah yang dipupuk secara turun temurun pada elite bangsawan Bugis.

8. Hubungan Elite - Massa

Dukungan masyarakat sangat penting. Jangan sampai rakyat membenci elite. Hubungan dengan masyarakat jangan dilihat secara berjenjang, tetapi berbaur. Meskipun bukan keturunan bangsawan tetapi mereka yang bangsawan jika mau mendapat penghargaan, maka harus mendapat perhatian masyarakat. Karena bagaimanapun juga, masyarakat dapat menilai. Seorang pemimpin harus mau mengunjungi masyarakatnya. Jangan sampai tinggi hati,

karena masyarakat melihat apa yang bangsawan atau elite lakukan. Penguasa harus mampu merendahkan kepalanya untuk mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya dari masyarakat.

9. Partisipasi Politik Massa

Partisipasi politik massa, cenderung melihat para orang yang disegani dan dihormatinya. Masyarakat kita masih melihat pada pendekatan kultural. Apa yang dipilih oleh pemimpinnya, maka masyarakat saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Dalam berpartisipasi, masyarakat melihat siapa yang harus dipatuhi dan diikuti. Jika orang yang akan dipilih adalah layak, maka partisipasi tinggi. Masyarakat akan partisipatif ketika menggunakan pendekatan non formal. Jika pendekatannya legal formal terkesan masyarakat melakukannya setengah hati ada keterpaksaan.

10. Demokrasi

Demokrasi dalam konstruksi elite bangsawan Bugis, yaitu harus dipilih oleh Dewan yang secara nyata tidak diragukan kepandaian dan keluhuran budinya. Rakyat memberi kepercayaan kepada Dewan yang telah dipilih sebelumnya. Dan ketika orang yang dipilih ternyata menyalahgunakan wewenangnya atau berlaku tidak adil, maka masyarakat tidak akan patuh padanya dan akan meninggalkan pemimpinnya. Dan seorang pemimpin harus turun, jika rakyat sudah tidak menghendaki.

ANDI TENRISOMPA —

Jadi, harus ada persetujuan antar rakyat dan penguasa. Sebelumnya, di Bugis pun telah ada konsep *To Manurung*, dimana rakyat melakukan kontrak sosial dengan orang yang akan memimpinya.

Demikian konstruksi sosial yang dibangun oleh elite bangsawan Bugis tentang politik, yang sedikit banyak telah mencoba mengikuti dinamika perkembangan masyarakat, sehingga nampak adanya paradigma baru yang dibangun.

Otoritas tradisional mengejawantahkan sesuatu yang berasal dari konsep turun temurun dan filosofi elite bangsawan yang selalu dipatuhi dalam kondisi apapun, telah terjadi pergeseran. Untuk tetap eksis, setidaknya elite bangsawan Bugis pada dasarnya menganggap keberadaan rakyatnya adalah diatas segalanya, karena legitimasi berasal dari rakyat.

EPILOG



Gelombang demokratisasi membawa pengaruh dan perubahan yang begitu dramatis di semua belahan dunia. Tidak ada satupun negara yang bisa bebas dari sentuhan dan sapuannya. Sekuat apapun suatu negara membangun sistem otoriternya, cepat atau lambat akan terinfiltrasi oleh ide-ide demokrasi.

Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia. Bahkan, tidak hanya membangkitkan kesadaran alam pikiran mereka yang berada dilingkar pusat kekuasaan, namun sudah merasuk ke alam pikiran orang-orang yang mendiami wilayah-wilayah pedalaman. Implikasinya, seluruh warga negara baik tua maupun muda, dari berbagai sudut Indonesia serentak menuntut dibentuknya lembaga yang lebih demokratis.

Gelora aspirasi yang menghendaki perubahan kearah kehidupan yang lebih demokratis, agaknya memungkinkan terciptanya kondisi politik lokal dengan nuansa yang berbeda di masing-masing daerah, sehingga memunculkan fenomena yang khas. Kekhasan yang muncul dalam konstelasi perpolitikan lokal itu, menunjukkan bahwa di daerah tersebut tengah terjadi proses dinamika politik yang sangat dinamis.

Hal yang sama juga terjadi di Propinsi Sulawesi Selatan, sebuah daerah dengan sejarah kebangsawanan yang ketat dan cukup mapan pada masanya.

Sebagaimana wilayah-wilayah tradisional lainnya, kebangsawanan etnis Bugis pada zaman dulu dibangun dengan menggunakan landasan bahwa bangsawan itu selalu dekat dengan sumber kekuasaan. Peran penting adanya relasi

ANDI TENRISOMPA —

tak terpatahkan antara bangsawan dengan sumber kekuasaan, bukanlah hal aneh bagi masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya.

Trankel 1998 dalam bukunya *Facet of Power and Its Limitation Political Culture in Southeast Asia*, menunjukkan bahwa tema-tema yang identik, juga dibangun di wilayah Asia lainnya seperti di China, Vietnam, Laos, Thailand dan Burma. Lebih eksplisit lagi tampak pada tulisan Benedict Anderson (1990).

Memang, ketika tingkat literasi masyarakat masih sangat rendah, berbagai narasi yang menekankan pada arti penting konsep kekuasaan dan superioritas posisi para elite bangsawan sebagai hal yang telah ditakdirkan dan tidak dapat diganggu gugat, dapat diterima dengan keiklasan yang penuh.

Untuk memantapkan posisinya, elite bangsawan Bugis juga membangun suatu kisah mitologi yang bernuansa magis dan sakral. Bangsawan berhak memiliki kekuasaan karena mereka dekat dengan sumber kekuasaan yang berupa benda sakral seperti gaukang. Kesakralan merupakan alat legitimasi yang kuat dan efektif untuk memposisikan dan menundukkan masyarakat sebagai kelompok yang harus diperintah.

Namun keefektifan tersebut akan berubah menjadi ancaman, ketika masyarakat yang dulunya tunduk mulai dipengaruhi oleh pemikiran yang bernuansa desakralisasi serta meningkatnya taraf pendidikan.

Tuntutan masyarakat yang menghendaki untuk segera membangun lembaga yang lebih demokratis, tampaknya

ditanggapi dengan cara yang cerdas oleh kaum elite bangsawan Bugis di Sulawesi Selatan. Ditengah-tengah ancaman yang akan menggeser kekuasaan tradisional, dengan menggunakan bingkai budaya lokal, elite-elite tradisional mampu melakukan aktualisasi nilai-nilai budayanya.

Dampaknya, angin perubahan tidak cukup mampu menggeser kaum elite pemegang kekuasaan tradisional (bangsawan) dari gelanggang politik. Realitas politik yang muncul adalah sebaliknya, ide-ide demokrasi dari hari ke hari semakin memposisikan kaum bangsawan sebagai kohesif group (elite yang bersatu) dengan posisi yang kokoh.

Kokohnya pondasi keberadaan kaum elite bangsawan Bugis sebagai kohesif group, ditengah-tengah gelanggang politik yang demokratis dan tidak berpihak pada kekuasaan tradisional, banyak dipengaruhi oleh kemampuan kaum bangsawan itu sendiri dalam usaha mereka mensiasati perkembangan dinamika politik dan tuntutan masyarakat luas.

Siasat tersebut berupa proses konversi dengan cara membuat rekonstruksi ulang terhadap makna kekuasaan demokratis yang lebih bernuansa warna lokal. Adanya penekanan pada warna lokal, diharapkan ide demokrasi tersebut dapat membumi dan sesuai dengan akar budaya setempat.

Terlebih lagi, gerakan untuk mobilisasi identitas lokal tengah dibangun dengan sekuat tenaga, demi kebanggaan akan sejarah dan budaya masyarakat. Hasilnya, kini telah terbentuk Dewan Adat Propinsi Sulawesi Selatan.

ANDI TENRISOMPA —

Adapun proses konversi tersebut berupa; *pertama*, penafsiran ulang tentang konstruksi kebangsawanan yang tepat ditengah masyarakat yang terdidik dan dunia yang serba rasional. Hal ini sangat penting, karena dengan adanya tafsir ulang tersebut, diharapkan makna kebangsawanan menjadi *frame of reference* yang memiliki daya afinitas atau daya pikat dan pesona yang luar biasa tingginya, bagi pemain-pemain politik.

Secara sadar atau tidak, masyarakat menganggap bahwa kebangsawanan menjadi *style of life* bagi pemain politik lokal. Implikasinya, secara tidak terduga memunculkan berbagai macam pseudo bangsawan semu agar mudah ikut menjadi pemain di wilayah ini.

Kedua, para bangsawan mencoba untuk mengejar pendidikan sebagai barometer yang penting bagi kehidupan politik lokal. Meskipun seorang bangsawan tetap dihormati dan dihargai oleh masyarakat, namun tanpa pendidikan yang memadai, maka peran yang akan dimainkan terbatas di wilayah desa.

Lain halnya bila bangsawan tersebut memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Selain dihargai oleh masyarakat, bangsawan tersebut akan dianggap layak untuk memimpin masyarakat pada tingkatan yang lebih tinggi. Dimana akan muncul anggapan bahwa yang bersangkutan sebagai bangsawan yang modern.

Ketiga, muncul strategi perkawinan politik sebagai akibat penafsiran ulang makna kebangsawanan, yang

dikonstruksi sebagai *style of life*. Tentu saja, dampak dari tafsir baru itu secara tidak langsung mensyaratkan setiap pemain politik lokal harus memiliki darah kebangsawanan yang dapat dirunut keatas. Di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, yang paling menonjol adalah di Kabupaten Bone, tanpa adanya darah kebangsawanan siapapun akan mendapatkan rongrongan dari masyarakat. Karena masyarakat tidak mau diperintah oleh pemimpin dari golongan non bangsawan, lebih-lebih dari golongan *Ata* (budak).

Meskipun telah terjadi pergeseran, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kondisi itu terlepas dari anggapan bahwa seorang bangsawan dapat memimpin dengan baik, hal tersebut juga sudah menjadi gaya hidup yang berkembang pada masyarakat Bugis.

Keempat, perlu untuk segera melakukan mobilisasi identitas etnik. Diharapkan, dengan adanya mobilisasi identitas tersebut rakyat akan bangga terhadap budayanya. Selain itu, tentu saja model kekuasaan tradisional yang mengutamakan peran bangsawan sebagai pemimpin tidak akan banyak digugat.

Hal yang dibutuhkan adalah adanya perubahan yang bersifat kekeluargaan, tanpa harus mengkesampingkan peran dan watak bangsawan. Dimana sejak dulu telah terbentuk dogma bahwa kaum bangsawan merupakan kelompok pengayom serta pribadi-pribadi yang memiliki perilaku baik.

Kelima, berubahnya hubungan patron-klien. Patron-klien pada masa otoritas tradisional mengalami masa

ANDI TENRI SOMPA —

keemasan, selalu merujuk pada hubungan antara budak dengan raja, hubungan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Namun di masa sekarang, model hubungan tersebut telah dimodifikasi dan diterapkan secara kekeluargaan.

Keenam, membangun sebuah hegemoni terhadap etnis lain melalui saluran organisasi politik seperti GOLKAR. Sehingga yang muncul adalah hubungan emosional, yang mengesampingkan hubungan tradisional dalam hal kekerabatan.

Dalam konteks transisi demokrasi, diharapkan peran atau andil budaya lokal menjadi suatu masukan berharga, demi terciptanya suatu model demokrasi yang memang berasal dari budaya-budaya lokal masyarakat Indonesia. Penelitian politik lokal merupakan kajian yang menarik dan masih sangat relevan untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang.

Dalam masa transisi demokrasi, ibaratnya bangsa Indonesia sedang mencari jati diri. Dengan kata lain, Indonesia sedang mencari suatu format yang mampu menjadi payung bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap politik lokal sangat penting bagi pemerintah pusat dan kajian akademik.

Konversi otoritas tradisional elite bangsawan Bugis dalam melakukan perubahan politik di wilayah publik, merupakan salah satu wujud bertahtanya otoritas tradisional kontemporer. Implementasi dari perjuangan rakyat yang

meminta adanya otonomi daerah, memperkuat temuan tersebut. Hal tersebut juga mendukung pendapat Budiman (1994), yang menyatakan bahwa dalam struktur politik yang otoritarian, kekuatan-kekuatan masyarakat untuk melepaskan diri dari pengaruh dominasi negara (pemerintah) justru dipandang sebagai kondisi yang diperlukan untuk menuju demokratisasi.

Pada umumnya, orang terlebih lagi bagi mereka yang mengadopsi pemahaman tentang demokrasi yang berkiblat pada demokrasi, yang terjadi di Sulawesi Selatan tidak sesuai dengan konsep demokrasi yang diharapkan, meskipun secara gradual. Tetapi fenomena tersebut juga merupakan fenomena positif bagi terciptanya perubahan sosial di Sulawesi Selatan dan sebagai manifestasi dari sebuah proses kearah demokratisasi yang berasal dari budaya lokal.

Kondisi tersebut juga mendukung tesis pertama Sparringa (2003), bahwa transisi di negeri ini, dalam banyak hal justru memperkuat struktur elite tradisional dari pada menyingkirkan mereka. Bahkan kebanyakan dari mereka, berhasil mengkonversikan otoritas itu untuk melakukan pelibatan politik (*political engagement*) secara efektif di wilayah publik.

Di Sulawesi Selatan, ortodoksi adat adalah sumber otoritas tradisional yang kerap dipakai untuk menghidupkan peran publik, di wilayah masyarakat yang jenuh dengan sorak demokrasi.

Elit bangsawan Bugis berupaya memperoleh, memperebutkan dan mendapatkan legitimasi kekuasaan,

ANDI TENRI SOMPA —

dengan melibatkan diri pada semua komponen golongan elit, yaitu elit politik, elit administrasi, elit intelektual, elit pengusaha, elit militer dan golongan yang bukan elit tetapi membantu pembentukan opini publik (Silalahi, 1989). Semua unsur tersebut diperankan oleh elit bangsawan Bugis. Demikian juga konsep elit yang menurut Koentjaraningrat (1994), bahwa elite ditingkat lokal terbagi atas dua yaitu elite atau pemimpin tradisional dan elite atau pemimpin masa kini.

Oleh elite bangsawan Bugis, kedua konsep tersebut dielaborasi. Yaitu elite tradisional yang mempunyai kekuasaan atas massa karena ciri-ciri tradisional yang dinilai tinggi oleh masyarakat lokal, seperti keturunan, berkekuatan sakti, kharismatik, berkemampuan ekonomis untuk melakukan upacara keagamaan, berkemampuan menggerakkan kekuatan fisik dan mengorganisir orang banyak atas dasar sistem sanksi, dengan elit masa kini yang dipandang mempunyai kekuasaan atas massa karena memiliki ciri-ciri masa kini, seperti kemampuan pilihan rasional untuk memecahkan berbagai masalah kemasyarakatan dan legitimasi berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

Kenyataan yang terjadi di Sulawesi Selatan kontemporer, meskipun belum sepenuhnya terpenuhi, tetapi perpacuan waktu akan membawa elite bangsawan Bugis pada pengelompokan yang ketiga, yaitu elaborasi antara elite tradisional dengan elite masa kini.

Secara umum, konsep elite yang dikemukakan oleh Pareto, Mosca, Michels yang dielaborasi oleh Putman (dalam Sudijono, 1995), pada prinsip utamanya masih relevan dengan

kondisi di Sulawesi Selatan. Secara internal, elite itu masih bersifat homogen, bersatu dan memiliki kesadaran kelompok. Kelompok elite juga memiliki kesadaran, keutuhan dan kebulatan tujuan kelompok.

Elite bukan merupakan satu kesatuan individu-individu yang saling terpisah. Tetapi sebaliknya, di Sulawesi Selatan isu identitas seperti adanya Bosowa, Sipilu dan lahirnya Dewan Adat Daerah serta lahirnya Dewan Adat Propinsi, menunjukkan bahwa individu-individu yang ada dalam kelompok elite, khususnya elite bangsawan Bugis, saling mengenal dengan baik, memiliki latar belakang yang mirip dan memiliki nilai-nilai kesetiaan serta kepentingan yang sama.

Adanya *style of life* yang berkembang dalam masyarakat Sulawesi Selatan, tentang perlunya penggabungan elite bangsawan dengan jabatan struktural, kekayaan dan atau pendidikan. Kondisi tersebut mendukung teori Schoolr (1986), bahwa elite merupakan golongan utama dalam masyarakat didasarkan pada posisi mereka yang tinggi dalam struktur masyarakatnya. Dimana posisi yang tinggi tersebut terdapat dalam bidang kehidupan. Antara lain ekonomi, pemerintahan, kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan pekerjaan lainnya.

Lebih khusus lagi, legitimasi teori kekuasaan Max Weber (dalam Giddens & Held, 1982), yang menjelaskan bahwa seseorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan kehendaknya dalam bentuk suatu aksi sosial, baik terhadap mereka yang menentang kehendak itu ataupun terhadap yang mengikutinya. Kekuasaan yang dikondisikan secara ekonomis tidak identik dengan kekuasaan dalam arti yang

ANDI TENRISOMPA —

sesungguhnya. Sebaliknya, munculnya kekuasaan ekonomis merupakan akibat dari adanya kekuasaan yang dilandaskan pada faktor-faktor lain. Orang tidak hanya ingin mendapatkan kekuasaan untuk memperkaya diri secara ekonomis semata. Kekuasaan maupun kekuasaan ekonomis dapat dinilai menurut esensi masing-masing.

Tidak jarang orang menginginkan untuk mendapatkan kekuasaan dan kehormatan sosial seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan. Tetapi kekuasaan ekonomi belaka, khususnya kekuasaan yang berdasarkan uang semata, bukan merupakan landasan kehormatan atau prestise sosial yang diakui pada masyarakat Sulawesi Selatan. Kehormatan sosial akan terjadi jika mampu menyambung antara elemen kekuasaan, seperti disebut di atas dengan gelar kebangsawanan *Puang* atau embel-embel *Andi* di depan nama seseorang.

Dengan demikian, kondisi tersebut tidak banyak mendukung teori Marx tentang kelas penguasa, yang menganggap bahwa hanya kelas yang mempunyai kekuatan material yang mampu menentukan kebijakan. Adanya *style of life* dalam masyarakat Sulawesi Selatan, akhirnya tidak melegitimasi bahwa kekayaan materi mampu menembus posisi elite. Dengan kata lain, kekayaan bukanlah satu-satunya parameter atau passport untuk menjadi kelas penguasa di Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA



- Chilcote, Ronald H (2003); *Teori Perbandingan Politik Penelusuran Paradigma*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djojosoekarto, Agung & Hauter, Rudi (ed), (2003); *Transformasi Menuju Demokrasi Lokal*, Jakarta: Adeksi.
- Djunaedy, Endy, 1979, *Makkuraga: Studi Kepemimpinan Kepala Desa dalam Melaksanakan Lomba Desa di Desa Tettikengrarae dan Desa Barae, Kecamatan Mariorwawo, Kab Soppeng, Ujung Pandang*: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, UNHAS.
- Field G. Lowell & Higley John (1980); *Elitism*, London, Boston and Hanley Plindens University Library Routledge & Kegan Paul.
- Geertz, Clifford, (1992); *Politik Kebudayaan*, Kanisius: Yogyakarta.
- Giddens, Anthony (1986); *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- & Held, David (1987); *Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Glaser G. Barney & Strauss L. Anselm (1985); *Penemuan Teori Grounded Beberapa Strategi Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Goda, Toh, 1999, *Political Culture and Ethnicity; An Anthropological Study in Southeast Asia*, Quezon City: New Day.
- Haralambos and Holborn, 2000, *Sociology Themes and Perspectives*, London: Collins Education.
- Hikam, Muhammad AS (1996); *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3S.

ANDI TENRISOMPA —

- Huntington, P Samuel & Nelson, Joan (1988); *Partisipasi Politik*, Jakarta.
- Huntington, P Samuel, (2000); *Benturan Antar Peradaban*, Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Huntington, P. Samuel (2003); *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kaplan, David & Manners, (1999); *Teori Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keller, Suzanne, (1995); *Penguasa dan Kelompok Elit*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat (1984); *Kepemimpinan dan Kekuasaan: Tradisional, Masa Kini, Resmi dan Tidak Resmi* dalam Miriam Budiarjo (ed), *Aneka Pikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Kymlicka, Will, *Kewargaan Multikultural*, Jakarta: LP3ES.
- Lauher, H Robert, (1993); *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Lay, Cornelis, M.A (ed) (2001); *Nasionalisme Etnisitas, Pertaruhan Sebuah Wacana*, Yogyakarta: DIAN/Interfidei, KOMPAS dan Forum Wacana Muda.
- Legg, R Keith, (1983); *Tuan, Hamba dan Politisi*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Lijphart, Arend (1997); *Patterns of Democracy*, New Haven and London: Yale University Press.
- Mahardika, Timur (2000); *Gerakan Massa Mengupayakan Demokrasi dan Keadilan Secara Damai*, Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama.

- Maleong, J. Lexy (1991); *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remadja Karya.
- Marx, Karl (2000); dalam Ritzer (ed), *Sociological Theory*, Singapore: Mc. Graw-Hill Book Co.
- Mattalitti, Arief, (1986); *Pappaseng To Riolata (Wasiat Orang Dulu)*, Jakarta: Proyek Penerbit Buku Sastra dan Indonesia dan Daerah.
- Mattulada, (1985); *Latoa: Sebuah Analisa Antropologi Politik Orang Bugis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- , (1996); dalam Najib (ed), *Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara*, Yogyakarta, LKPSM.
- Mosca, Gaetano (1976); dalam Robert D. Putnam, *The Comparative Studi of Political Elites*, New Jersey: Prentice Hall.
- Muhadjir, Noeng, (1996); *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mukhlis and Kathryn Robinson (Eds), 1985b, *Politik, Kekuasaan, dan Kepmimpinan di Desa*, Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- Mukhlis and Kathryn Robinson (Eds), 1985c, *Panorama Kehidupan Sosial*, Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- Najib, Muhammad (Ed) (1996); *Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara*, Yogyakarta: LKPSM.
- Parry, Geraint (1969); *Political Elites*, London: George Allen and Unwin LTF Ruskin House, Museum Street.
- Pelras, Christian, (1976); *Pelapisan dan Kekuasaan Tradisional di Tanah Wajo*, Budaya Jaya 96 Th. IX Mei: 266-320

ANDI TENRI SOMPA —

- (1981); *Hubungan Patron-Klien dan Masyarakat Bugis* – Makassar, naskah ketik.
- Piliang, J Indra (ed), (2001); *Merumuskan Kembali Indonesia*, Jakarta: CSIS.
- Poloma, M. Margaret (1984); *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali.
- Putnam, Robert. D (1995); dalam Mas'ode & MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Riff, Michael, A (ed) (1995); *Kamus Ideologi Politik Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, George (1992); *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rumampuk, M.R, 1975, *Peranan Kepala Desa di Kecamatan Bontomarannu, Kab Gowa, Sulawesi Selatan, Ditinjau dari Aspek Kepemimpinan dan Administrasi*, Ujung Pandang: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Hasanuddin.
- Schouten, M.J.C, 1998, *Leadership and Social Mobility in a Southeast Asian Society*, Leiden: KITLV.
- Shri A P Heddy, (1988); *Minawang: Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Soekanto, Soerjono (1984); *Beberapa Teori tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Soemardjan, Selo (1988); *Striotip Etnik, Asimilasi, Integrasi Sosial*, Jakarta: PT Pustaka Grafika Kita.
- Sparringa, Daniel (2003); *Transisi Demokrasi dan Otonomi Daerah: Sebuah Refleksi atas Lembaga di Daerah dan Formasi Elite Politik di Indonesia*, Jakarta: DEPDIKNAS.

- Spradley, James P, (1997); *Metode Etnografi*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Sudijono, Sastro Admojo (1995); *Prilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sukarna (1981); *Kekuasaan Kediktatoran dan Demokrasi*, Bandung: Alumni.
- Surbakti, Ramlan (1992); *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- (1999); *Implikasi Undang-undang Politik terhadap Politik Lokal*, dalam Widyapraja edisi XXII, Jakarta: Media Informasi Masalah Pemerintahan.
- Suyono, Ariyono (1985);,; *Kamus Antropologi*, Jakarta: Pressindo.
- Trankell, Ing-Britt and Laura Summers (ed), 1988, *Facet of Power and Its Limitation Political Culture in Southeast Asia*, Uppsala Studies in Cultural Anthropology.
- Turner S. Bryan (1978); *Marxisme & Revolusi Sosial Dunia Islam*, Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia.
- Vanhanen, Tatu (1997); *Prospects of Democracy A study of 172 Countries*, London: Routledge.
- Van Niel, R, 1984, *The Emergence of the Modern Indonesia Elite*, Leiden: KITLV.
- Varma, S.P (1985); *Teori Politik Modern*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Warnaen, Suwarsih, (2002), *Stereotip Etnis dalam Masyarakat Multietnis*, Yogya: Mata Bangsa.
- Weber, Max, (2001); *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, Surabaya: Pustaka Prometheus.

ANDI TENRISOMPA —

Widjaja, Albert (1982); *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: LP3S.

Zainuddin A. Rahman (1992); *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

KARYA ILMIAH

Abidin, Andi Husni, 1993, *Suatu Analisis Perbandingan tentang Sistem Pemerintahan Kerajaan Wajo dan Gowa*, Ujung Pandang: FISIP UNHAS (Skripsi).

Aliamir, 1993, *Tinjauan Historis Politik Pemerintahan Kerajaan Puang Rimanggalatung di Wajo*, Ujung Pandang: FISIP UNHAS (Skripsi).

Askari, 1993, *Integrasi Sosial Antar Etnik Bugis dan Etnik Makassar, Studi Kasus di Desa Timbuseng Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan*, Surabaya: Pascasarjana UNAIR (Thesis).

Gustiana, 2001, *Perjuangan Eks Afdeling Mandar dalam Proses Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat*, Surabaya: Pascasarjana UNAIR (Tesis).

Manuntun, Herny, 1992, *Pengaruh Budaya Politik Lokal Terhadap Proses Pengambilan Keputusan di DPRD Tingkat II Tana Toraja*, Ujung Pandang: FISIP UNHAS (Skripsi).

Maulidjuni, Andi Irlan, 1997, *Komunikasi Politik Bangsawan Gowa dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa*, Ujung Pandang: FISIP UNHAS (Skripsi).

Rakib, Muhammad, 2002, *Analisis Perilaku Kepemimpinan*

Bugis dengan Karakteristik Komunikasi Antar Pribadi Tokoh Masyarakat terhadap Pembangunan Desa di Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare, Makassar: Pascasarjana UNHAS (Thesis).

- Rauf, Abdul Khalik, 1999, *Perkawinan Adat Bugis Paria*, Surabaya: Pascasarjana UNAIR (Thesis).
- Wahab, Hurriyah Ali, 1993, *Analisis tentang Proses Pemilihan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang (Periode 1993-1998)*, Ujung Pandang: FISIP UNHAS (Skripsi).
- Sparringa, T. Daniel (1997), *Discourse, Democracy and Intellectuals in Order Indonesia A Qualitative Sociological Study*, Australis: Flinders University.
- Tutriani, Andi, 1997, *Peranan Elite Bangsawan dalam Pembangunan Politik*, Ujung Pandang: FISIP UNHAS (Skripsi).
- Yakub, Andi, 1998, *Elit lokal dan Orde Baru: Suatu Studi tentang Respon Elite Bugis terhadap Diskursus Politik Orde Baru*, Surabaya: Pascasarjana UNAIR (Tesis).

UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

ANDI TENRISOMPA —

MAJALAH / JURNAL

- Cable, Vincent (1999); *Politik Identitas: Primordialisme Pasca Perang Dingin*, dalam Gerbang Jurnal Keagamaan dan Demokrasi Edisi I Th. II, Surabaya: Lembaga Studi Agama dan Demokrasi (eLSAD) dengan The Asia Foundation (TAF).
- Caldwell, Ian, 1995, *Power, State and Society Among the Pre-Islamic Bugis*, dalam *Bijdragen tot de Taal, Land, en Volkenkunde*, 151.3, KITLV.
- Claessen, H.J.M, 2000, *Ideology, Leadership and Fertility, Evaluating a Model of Polynesian Chiefship*, dalam *Bijdragen tot de Taal, Land, en Volkenkunde*, 156.4, KITLV.
- Cummings, William, 1999, *Only One People but Two Rulers; Hiding the Past in Seventeenth-Century Makasarese Chronicles*, dalam *Bijdragen tot de Taal, Land, en Volkenkunde*, 155.1, KITLV.
- Errington, S, 1977, *Siri, Darah dan Kekuasaan Politik di Dalam Kerajaan Luwu Zaman Dulu*, dalam *Bingkisan* 1: 4062.
- Mattulada, 1974, *Elite di Sulawesi Selatan*, dalam *Bulletin Yayasan Perpustakaan Nasional* 1: 21-33.
- Mattulada, 1977b, *Kepemimpinan pada Orang Makassar*, dalam *Berita Antropologi* 32/33: 58-66.
- Mattulada, 1993, *Leadership and Democracy in the Tradition of Nusantara Society*, dalam *Lontara, Journal of Hasanuddin University* 1-1: 37-54.
- Pelras, Christian, 2000, *Patron-Client Ties Among The Bugis and Makassarese of South Sulawesi*, dalam *Bijdragen tot de Taal, Land, en Volkenkunde*, 156.3, KITLV.

Reid, Anthony, 1981, *A Great Seventeenth Century Indonesian Family; Matoaya and Pattingalloang of Makassar*, dalam Masyarakat Indonesia 8-1: 1-28.

Rosler, Martin, 2000, *From Divine Descent to Administration, Sacred Heirlooms and Political Change in Highland Goa*, dalam Bijdragen tot de Taal, Land, en Volkenkunde, 156.3, KITLV.

Usman, Sunyoto (1991); *Struktur Interaksi Kelompok Elit dalam Pembangunan*, dalam Prisma Vol. XX, No. 6, Jakarta LP3ES.

WEBSITE

Amirudin, Bebaskan Pilgub dari Aksi Premanisme, Suara Merdeka Kamis, 24 April 2003.

Bulkin, Farchan, Kapitalisme, Golongan Menengah dan Negara: Sebuah Catatan Penelitian
<http://www.geocities.com/edicaHy/ekopol/kapitalisme.html>

Gerung, Rocky, Kuldesak Transisi Demokrasi
<http://www.arupa.or.id/publications>

Hamid, Syarwan, Mewadahi Peran Serta Politik Masyarakat
<http://www.geocities.com/CapitolHill/3786/syarwan.html>

Hidayat, Syarif, Desentralisasi dan Transisi Menuju Demokrasi (Bagian 2 selesai)
<http://mail2.factsoft.de/pipermail/national/2003-April/015741.html>
Rabu, 16 April 2003

Krina, Loina Lalolo, Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi http://good-governance.bappenas.go.id/konsep_files/good%20governance.pdf

ANDI TENRISOMPA —

Khaidir, Piet H, Signifikansi Masyarakat Politik Pragmatis, Kompas, 28 Juni 2002
<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0206/28/opini/sign05.htm>

Manshur, Faiz, Mata Pena Kaum Muda untuk Perubahan, Kamis, 17 April 2003
<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0403/17/khazanah/>

Sembiring, JJ Amstrong, Klas-Klas Sosial dan Perjuangan Klas
<http://groups.yahoo.com/group/bubarkangolkar/message/1990>

Sirry, Mun'im A, Inklusivisme Politik
<http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2002-November/000684.html>

Sparringa, Daniel, Sistem Demokrasi Kita Menghasilkan "Zombie", Kompas, 07-0202004
<http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0102/07/Politikhukum/842339.htm>

Sarkawi, Dari Huruf Lontara ke Latin, Pergeseran Pendidikan Tradisional ke Kolonial di Makassar.
www.Depdiknas

Indikator Sistem Politik Demokratis
<http://buletinlitbang.dephan.fo.id/index.asp?vnomor=9&mnorutisi=5>

Partisipasi dan Demokrasi dalam Kebijakan
http://www.ftppm.org/Prosiding_Kaliurang/kebij-2.rtf

Demokratisasi Institusi dan Institusional Demokrasi (totaliterisme/Otoriterisme/Sistem Demokratis)
<http://www.geocities.com/apii-berlin/demoins.html>

Dewan Pemerintah Koalisi Demokratik, Jawabnya
<http://www.xs4all.nl/~prdeuro/LIBERATE/Nomor&Fokus-iv.htm>

— ANDI TENRI SOMPA

Sejarah Singkat Makasar
<http://www.makassar.go.id/sejarah1.html>

Membangun Pondasi Good Governance di Masa Transisi, 26
Januari 2000
[http://www.transparansi.or.id/agenda/agenda2/seri_dialog/
dialog32.html](http://www.transparansi.or.id/agenda/agenda2/seri_dialog/dialog32.html)

Konsolidari Demokrasi
<http://www.fppm.org/Pojok/konsolidasi%20demokrasi.htm>

Pilihan Rakyat Bisa Bantu Akhiri Masa Transisi, 22 Desember
2003
[http://www.kompas.co.id/kompas_cetak/0312/22/utama/7
9854.html](http://www.kompas.co.id/kompas_cetak/0312/22/utama/79854.html)

ANDI TENRI SOMPA —

TENTANG PENULIS



— ANDI TENRI SOMPA



Dr. ANDI TENRI SOMPA, SIP., M.Si; lahir di Ujung Pandang, 21 Mei 1976. Menyelesaikan pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Umum (SMU) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, S1 Program Studi Ilmu Politik Pemerintahan di Universitas Hasanuddin Makassar, S2 Program Studi Sosiologi Politik di Universitas Airlangga Surabaya dan S3 Program

Studi Ilmu Politik di Universitas Indonesia Jakarta.

Saat ini tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin dan menjabat sebagai Lektor pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekretaris pada Program Magister Sains Administrasi Pembangunan (MSAP) ULM serta Direktur Center for Election and Political Party University Link Universitas Lambung Mangkurat (CEPP ULM). Juga tercatat pernah menjadi tenaga edukatif di beberapa perguruan tinggi, seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Pancasakti Makassar, Universitas Widya Kartika Surabaya dan Universitas Islam Kalimantan Selatan.

Selain mengajar, juga aktif melakukan kegiatan-kegiatan survey dan penelitian. Seperti survey tentang Kepuasan Pelanggan PT PLN Wilayah Kalselteng (2007) dan survey Kepuasan Pelanggan Indofood (2008). Penelitian tentang

ANDI TENRISOMPA —

Pemberdayaan Masyarakat (2007 dan 2015), tentang Studi Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan (2009) dan Kepemimpinan Kepala Desa Pasca Pengangkatan Sekdes sebagai PNS di Kalsel (2009), tentang Evaluasi Pemilu Legislatif (2014), tentang Partisipasi Politik Masyarakat Kota Banjarmasin pada Pileg dan Pilpres 2014 (2015), tentang Hibah Bersaing Model Resolusi Konflik Sistem Plasma Dalam Masyarakat Kab Tanah Bumbu (2017) dan tentang Pemetaan Konflik di Kab Tanah Bumbu (2016). Juga aktif menulis artikel-artikel yang dimuat dalam Jurnal Publika serta menulis beberapa buku seperti Kekuatan-Kekuatan Politik Di Indonesia (UMMU Press, bersama mahasiswa Program Doktorat UI, 2011) dan Evaluasi Pemilu Legislatif Di Indonesia (bersama Tim LIPI, sudah diterbitkan dalam versi bahasa Inggris. Aktif menjadi nara sumber dalam kegiatan-kegiatan pelatihan, seminar maupun diskusi kepolitikan, pemilihan dan kajian perempuan, serta menjadi moderator dalam kegiatan debat publik dan seminar.

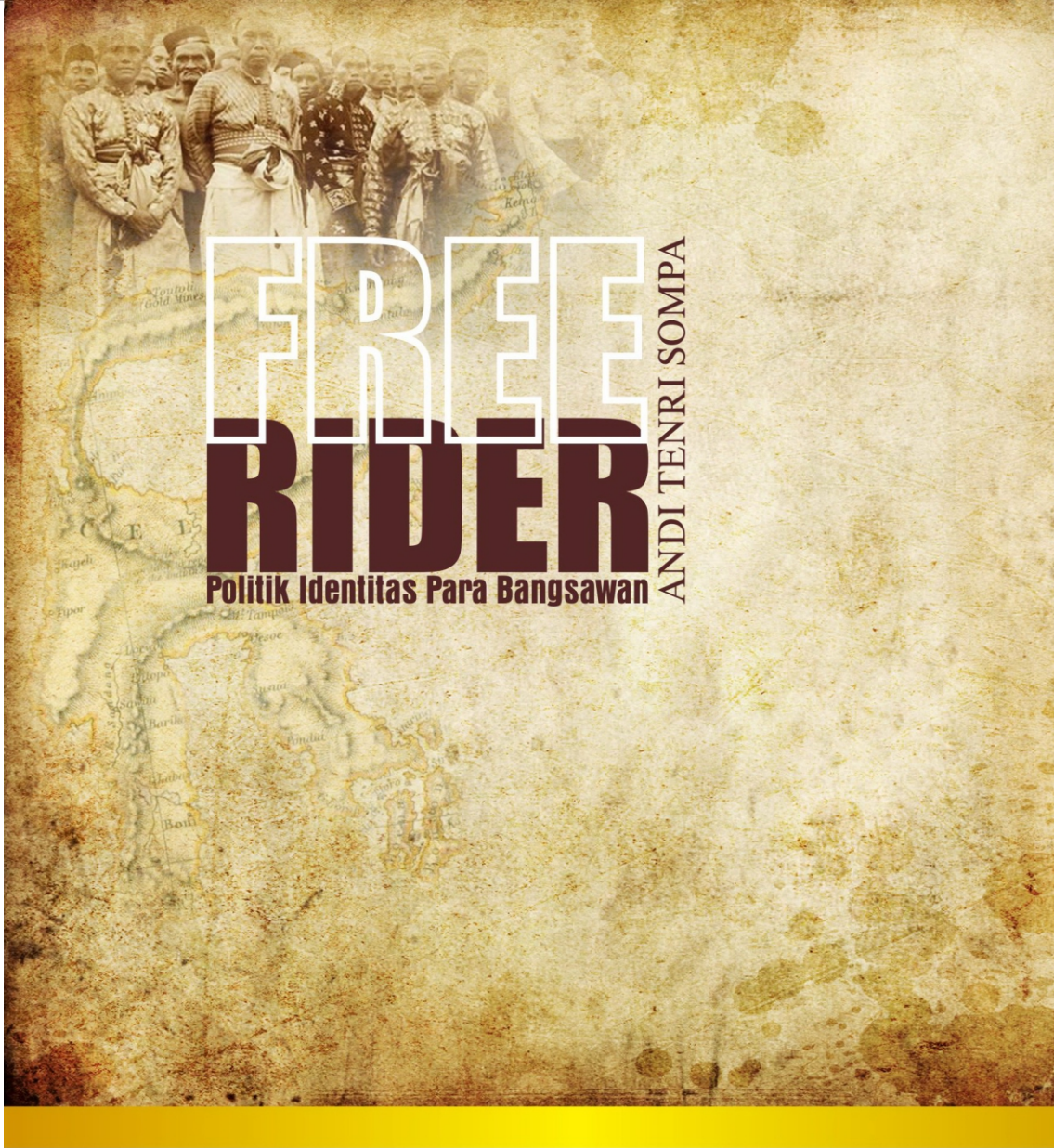
Diluar kegiatan akademisi, tercatat sebagai Ketua Gerakan Nasional Jaring Politisi dan Pemimpin Bersih Kalsel, Sekretaris Cabang Banjarmasin pada Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Sekretaris Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kalsel, Koordinator Mitra Pengawas Pemilu Kalsel (2013), Anggota Tim Seleksi Bawaslu Kalsel (2012), Sekretaris Tim Seleksi KPU Kalsel (2012), Anggota Tim Seleksi Panwaslu Kab/Kota se Prov Kalsel (2012), Ketua Tim Seleksi Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kab. Kota Baru (2014), Sekretaris Tim Seleksi Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (2016), Sekretaris Tim Seleksi Komisi

Pemilihan Umum Award Kalsel (2015), Koord Agen SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi) Kalsel (2016), Anggota Tim Seleksi Lelang Jabatan Kepala Sekretariat KPU Kalsel (2015), Anggota Tim Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Kab Banjar (2016 dan 2017) dan Kab Kotabaru (2017), Tim Khusus Bupati Kab Banjar, Sekretaris Tim Penyusun Borang Pendirian S3 Ilmu Sosial ULM, Ketua Tim Seleksi Terbuka Jabatan Sekretaris Daerah Kab Kotabaru (2017), Ketua Tim Penyusun Perencanaan Program Pengarusutamaan Gender Di Kab Banjar, Sekretaris Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2017-2022 dan Sekretaris Pengelola Program S3 Reguler Ilmu Sosial kerjasama Unair – ULM.

Sejak 1991 hingga saat ini telah berhasil meraih berbagai piagam dan penghargaan. Antara lain, penghargaan Kirab Remaja Nasional II (1991), Juara II Lomba Diskusi P-4 tingkat Provinsi (1997), Juara I Lomba Pemasyarakatan dan Pembudayaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (LP2 P-4), Wisudawan Terbaik dan peraih predikat cum laude pada program studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (1999). Penghargaan Work Shop Evaluasi Pemilu (2004), Work Shop Pemimpin Nasional Via Renata Bandung (2001), penghargaan dari Forum Komunikasi Nusantara (FKN) Indonesia (2004), penerima sertifikat Penelitian Lokal dari Universitas Lambung Mangkurat (2005), sertifikat Metodologi Penelitian di Universitas Lambung Mangkurat (2009), Diklat Perencanaan Investasi di Daerah (2007). Piagam Penghargaan sebagai Penggiat Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (2014). Peserta TOT Pengarusutamaan

ANDI TENRISOMPA—

Gender oleh Kementerian PPA (2016). Peserta terbaik pada TOT Revolusi Mental oleh Kementerian PMK (2016) dan penerima Bawaslu Award 2016 Kategori Pengamat Sosial Politik Terfavorit oleh Bawaslu Prov Kalsel (2016).



Diterbitkan oleh:



CEPP - ULM
"Making Democracy Works for Indonesian People"

ISBN 978-602-51130-1-7



9 786025 113017